

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



Walikota Tangerang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan syukur Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2016.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Akhirnya, dalam rangka mewujudkan visi Kota Tangerang "TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH" perlu upaya yang terus-menerus dalam proses pembangunan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tangerang,

Maret 2017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Kondisi Kota Tangerang	1-7
1.3 Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi	1-25
1.4 Sistematika LKIP 2016	1-34
BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	2-1
2.1 Rencana Strategis	2-1
2.2 Visi	2-3
2.3 Misi	2-6
2.4 Tujuan Serta Sasaran Sebelum dan Setelah Penyelarasan	2-10
2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2016	2-19
2.6 Kebijakan Pembangunan Tahun 2016	2-19
2.7 Indikator Kinerja Utama	2-20
2.8 Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2016	2-21
2.9 Rencana Anggaran Tahun 2016	2-23
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	3-1
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	3-2
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2016	3-6
3.3 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	3-8
3.3.1 SASARAN 1	3-11
3.3.2 SASARAN 2	3-20

3.3.3	SASARAN 3	3-29
3.3.4	SASARAN 4	3-32
3.3.5	SASARAN 5	3-45
3.3.6	SASARAN 6	3-50
3.3.7	SASARAN 7	3-53
3.3.8	SASARAN 8	3-58
3.3.9	SASARAN 9	3-69
3.3.10	SASARAN 10	3-85
3.3.11	SASARAN 11	3-88
3.3.12	SASARAN 12	3-95
3.3.13	SASARAN 13	3-100
3.3.14	SASARAN 14	3-114
3.3.15	SASARAN 15	3-115
3.4	Akuntabilitas Keuangan	3-127
3.5	Prestasi Dan Penghargaan	3-133
	BAB 4. PENUTUP	4-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB 1

Tabel 1.1.	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2015.....	1-13
Tabel 1.2.	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2015....	1-13
Tabel 1.3.	Strukitur Perekonomia Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen).....	1-14
Tabel 1.4.	PDRB Kota Tangerang Tahun 2011 - 2015.....	1-16
Tabel 1.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2011 – 2015	1-16
Tabel 1.6.	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2011-2016	1-18
Tabel 1.7.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	1-19
Tabel 1.8.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Tangerang Tahun 2013-2015	1-20
Tabel 1.9.	Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2013-2015	1-24

BAB 2

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Penyelarasan Tahun 2016.....	2-10
Tabel 2.2.	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Setelah Penyelarasan	2-21
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 .	2-22
Tabel 2.4.	Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2016	2-24

BAB 3

Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2016	3-6
Tabel 3.2.	Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2016.....	3-9
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran 1	3-11

Tabel 3.4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2013-2016 (RpTrilyun)	3-16
Tabel 3.5. Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2013-2016	3-19
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran 2	3-20
Tabel 3.7. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2015	3-23
Tabel 3.8. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang 2014-2016	3-26
Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran 3	3-29
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran 4	3-32
Tabel 3.11. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Izin Usaha.....	3-34
Tabel 3.12. Tabel Rekapitulasi Izin Usaha Tahun 2016	3-35
Tabel 3.13. Jenis izin dan waktu penyelesaian izin	3-37
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran 5	3-45
Tabel 3.15. Jumlah Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016	3-46
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran 6	3-51
Tabel 3.17. Perkembangan Nilai PDRB ADHK sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan	3-51
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran 7	3-53
Tabel 3.19. Capaian Kinerja Sasaran 8	3-59
Tabel 3.20. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Tempat Buang Air Besar, Sumber Air Minum Utama, , dan Jenis Lantai Terluas di Kota Tangerang Tahun 2015	3-63
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sasaran 9	3-69
Tabel 3.22. Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tangerang	3-77
Tabel 3.23. Persentase Pola Konsumsi Penduduk Miskin dan Rata-rata Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Konsumsi Makanan Tahun 2015	3-81
Tabel 3.24. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2011-2015	3-83
Tabel 3.25. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang	3-84
Tabel 3.26. Capaian Kinerja Sasaran 10	3-85
Tabel 3.27. Capaian Kinerja Sasaran 11	3-88

Tabel 3.28. Kejadian dan Penanganan Konflik di Kota Tangerang Tahun 2016	3-91
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran 12	3-95
Tabel 3.30. Lokasi dan pengurangan lokasi banjir	3-96
Tabel 3.31. Capaian Kinerja Sasaran 13	3-101
Tabel 3.32. Persentase Kemacetan yang Tertangani.....	3-106
Tabel 3.33. Capaian Kinerja Sasaran 14	3-114
Tabel 3.34. Capaian Kinerja Sasaran 15	3-115
Tabel 3.35. Hasil IPA Sungai Cisadane	3-118
Tabel 3.36. Hasil IPA Sungai Mokevart	3-118
Tabel 3.37. Hasil IPA Sungai Angke	3-118
Tabel 3.38. Hasil IPA Sungai Sabi	3-119
Tabel 3.39. Hasil IPA Cirarab.....	3-119
Tabel 3.40. Hasil IPA Situ Cipondoh	3-119
Tabel 3.41. Hasil IPA Situ Gede	3-120
Tabel 3.42. Hasil IPA Bulakan	3-120
Tabel 3.43. Hasil IPA Cangkring.....	3-120
Tabel 3.44. Hasil Rekap IPA	3-120
Tabel 3.45. Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara.....	3-121
Tabel 3.46. Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan/Hutan	3-122
Tabel 3.47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3-122
Tabel 3.48. Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016	3-127
Tabel 3.49. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	3-128
Tabel 3.50. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Per Sasaran Strategis Tahun 2016	3-129
Tabel 3.51. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016	3-130
Tabel 3.52. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	3-132

DAFTAR GAMBAR

BAB 1

Gambar 1.1.	Peta Kota Tangerang	1-8
Gambar 1.2.	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2011 – 2015 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional	1-17
Gambar 1.3.	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang Periode 2013-2015	1-22
Gambar 1.4.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2011-2015	1-23
Gambar 1.5.	Grafik Perkembangan IPG Kota Tangerang Periode Tahun 2011-2015	1-25
Gambar 1.6.	Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang	1-29

BAB 3

Gambar 3.1.	Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2016	3-11
Gambar 3.2.	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015	3-24
Gambar 3.3.	Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang	3-26
Gambar 3.4.	Tangerang Smart City Partnership	3-31
Gambar 3.5.	Jumlah Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016.....	3-46
Gambar 3.6.	International Folklore Internasional	3-47
Gambar 3.7.	International Matematic and Sains Olympiad (IMSO)	3-47
Gambar 3.8.	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kota Tangerang (persen), 2015.....	3-52

Gambar 3.9. Pertumbuhan Ekonomi kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK Kota Tangerang 2011-2015.....	3-53
Gambar 3.10. Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang	3-54
Gambar 3.11. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tangerang	3-56
Gambar 3.12. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang	3-57
Gambar 3.13. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang	3-61
Gambar 3.14. Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)	3-62
Gambar 3.15. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran yang Terakhir di Kota Tangerang Tahun 2015.....	3-67
Gambar 3.16. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang	3-68
Gambar 3.17. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang 2011-2015.....	3-80
Gambar 3.18. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2013-2016	3-87
Gambar 3.19. Sebaran Lokasi Hambatan Lalu Lintas	3-110
Gambar 3.20. Lokasi Pengaturan Lalu Lintas.....	3-110
Gambar 3.21. Lokasi Pengendalian ATCS	3-110
Gambar 3.22. Lokasi Macet dan Pengaturan Lalu Lintas	3-111
Gambar 3.23. Lokasi Macet dan Pengendalian ATCS	3-111
Gambar 3.24. Lokasi Pengendalian ATCS dan Petugas	3-111
Gambar 3.25. Penyerahan Penghargaan Adipura Kirana Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori Kota Metropolitan	3-126

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kota Tangerang

Tahun 2016

Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

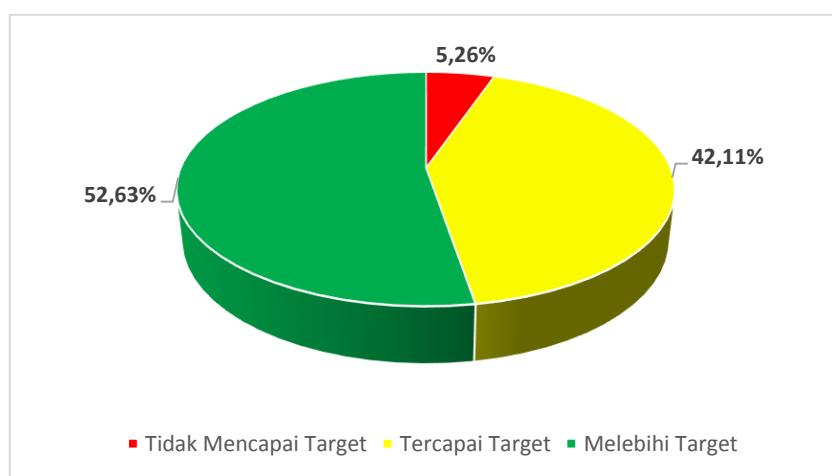
LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018.

Hasil pengukuran pada 19 Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang yang telah ditetapkan pada tahun 2016, sebagai berikut :

- 10 Indikator atau 52,63% melebihi target dengan kategori sangat tinggi
- 8 Indikator atau 42,11% sesuai atau tercapai target dengan kategori sangat tinggi
- 1 Indikator atau 5,26% tidak mencapai target dengan kategori sangat tinggi



Dalam Tahun Anggaran 2016, untuk pencapaian kinerja 15 (lima belas) sasaran strategis pada RPJMD Kota Tangerang termasuk 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.384.313.665.696,15 dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.157.989.915.691,00 atau 83,65% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance* yang didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada



setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas menekankan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagianya.

Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut maka Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas



yang memadai, LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKIP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2016.



Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



- perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016



17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

1.2 KONDISI KOTA TANGERANG

1.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kota Tangerang terletak antara $6^{\circ}6'$ – $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan (LS) dan $106^{\circ}36'$ – $106^{\circ}42'$ Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini.

1.2.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Tangerang adalah 164,54 Km² (tidak termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²). Secara administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:



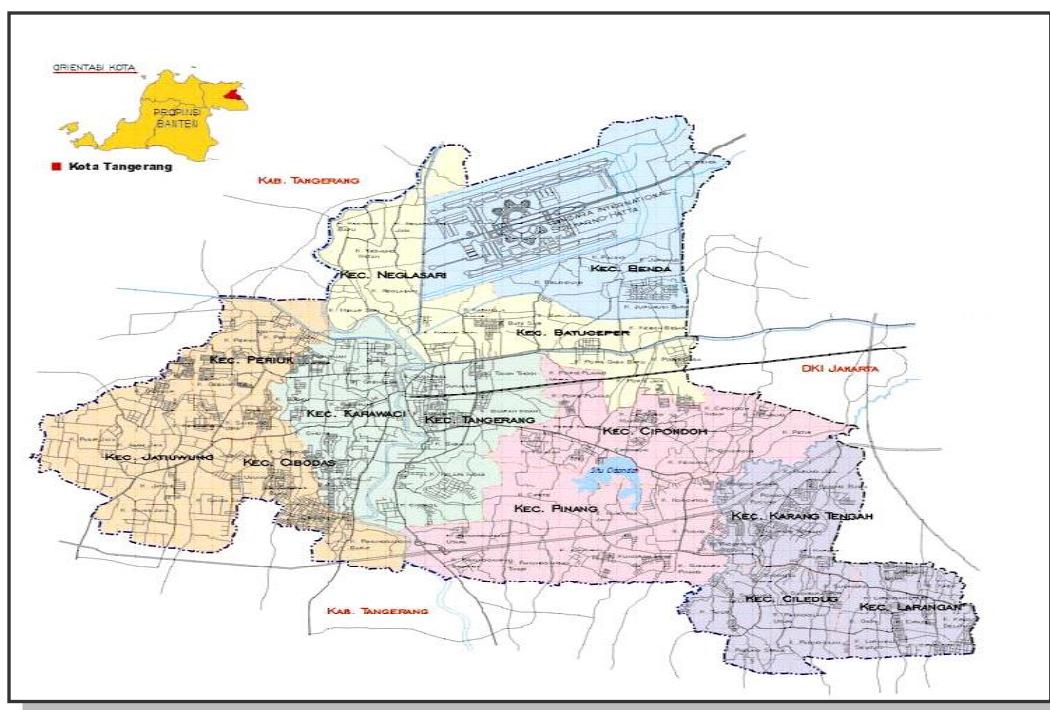
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang; dan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.1. Peta Kota Tangerang



1.2.3 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10 – 18 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di



atas permukaan laut, sedangkan bagian Selatan memiliki ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah. Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan hanya sebagian kecil di bagian Selatan kota kemiringan tanahnya antara 3-8%, yaitu berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.

1.2.4 Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2016 sejumlah 9.977 orang, yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

a. Jenis Kelamin

Laki-laki : 4.301

Perempuan : 5.676

b. Golongan

Golongan I : 165 orang

Golongan II : 1.817 orang

Golongan III : 5.206 orang

Golongan IV : 2.789 orang

c. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselon II : 34 orang

Esselon III : 156 orang



Esselon IV : 1.003 orang

Esselon V : 29 orang

d. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 6.390 orang, terdiri atas :

1. Tenaga guru sebanyak 5.655 orang
2. Tenaga kesehatan sebanyak 558 orang
3. Analis Kepegawaian sebanyak 4 orang
4. Assessor SDM Aparatur sebanyak 6 orang
5. Auditor sebanyak 20 orang
6. P2UPD sebanyak 14 orang
7. Pengawas Ketenagakerjaan sebanyak 13 orang
8. Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 8 orang
9. Penyuluhan Perikanan sebanyak 1 orang
10. Perencana sebanyak 3 orang
11. Pranata Komputer sebanyak 19 orang
12. Widya Iswara sebanyak 2 orang
13. Pengawas Sekolah sebanyak 72 orang
14. Penilik sebanyak 15 orang

e. Tingkat Pendidikan :

SD : 139 orang

SMP : 151 orang

SLTA : 1.307 orang

D1 : 60 orang



D2 : 517 orang

D3 : 629 orang

D4 : 80 orang

S1 : 6.248 orang

S2 : 836 orang

S3 : 10 orang

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan, pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian penghargaan

1) Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 663 orang, yang terdiri dari :

⇒ Satyalancana Karya Satya 30 Tahun sebanyak 271 orang;

⇒ Satyalancana Karya Satya 20 Tahun sebanyak 229 orang;

⇒ Satyalancana Karya Satya 10 Tahun sebanyak 163 orang

2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 881 Orang

3) Pemberian penghargaan Purna Tugas sebanyak 206 orang

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sebanyak 113 orang



- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 94 orang, terdiri dari :
 - ⇒ Diklatpim II : 2 orang
 - ⇒ Diklatpim III : 12 orang
 - ⇒ Diklatpin IV : 80 Orang
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 1.243 orang, dengan rincian :
 - ⇒ Pendidikan dan pelatihan teknis : 903 orang
 - ⇒ Pendidikan dan pelatihan fungsional : 340 orang

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 0 orang, tingkat sedang 0 orang, pelanggaran disiplin tingkat berat sebanyak 6 orang dan dalam proses sebanyak 6 orang.

1.2.5 Perekonomian

1.2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Tangerang tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2015



Lapangan Usaha	2013		2014*)		2015**)	
	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.314,39	1,39	1.534,72	1,39	1.739,17	1,38
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	36.335,26	38,20	38.310,66	34,48	41.285,07	32,73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	154,38	0,16	182,66	0,16	244,79	0,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61,35	0,06	66,64	0,06	73,78	0,06
F. Konstruksi	6.320,40	6,64	7.798,57	7,02	8.754,51	6,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.521,07	12,11	12.403,50	11,16	13.224,70	10,49
H. Transportasi dan Pergudangan	19.646,81	20,65	28.544,97	25,69	36.428,98	28,88
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.242,18	1,31	1.525,80	1,37	1.724,21	1,37
J. Informasi dan Komunikasi	4.342,47	4,57	5.098,71	4,59	5.476,81	4,34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.101,29	3,26	3.101,29	2,79	3.101,29	2,46
L. Real Estat	4.959,75	5,21	5.487,68	4,94	6.105,37	4,84
M,N. Jasa Perusahaan	917,50	0,96	1.045,63	0,94	1.217,84	0,97
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.111,68	1,17	1.254,78	1,13	1.444,75	1,15
P. Jasa Pendidikan	2.048,78	2,15	2.355,76	2,12	2.607,56	2,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	784,88	0,83	927,29	0,83	1.004,36	0,80
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.259,75	1,32	1.470,37	1,32	1.685,93	1,34
PDRB ADHB Kota Tangerang	95.121,94	100,00	111.109,03	100,00	126.119,12	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Tabel 1.2. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2015

Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.104,44	1,35	1.205,97	1,39	1.292,25	1,41
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	33.897,40	41,36	34.468,97	39,81	35.638,73	38,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	153,25	0,19	158,06	0,18	153,22	0,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62,18	0,08	67,06	0,08	70,60	0,08
F. Konstruksi	5.192,80	6,34	5.888,21	6,80	6.405,19	7,01



Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.815,51	13,20	11.447,99	13,22	12.001,85	13,13
H. Transportasi dan Pergudangan	12.791,83	15,61	13.151,16	15,19	14.146,70	15,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.071,81	1,31	1.230,14	1,42	1.318,56	1,44
J. Informasi dan Komunikasi	4.946,12	6,03	6.083,28	7,03	6.669,89	7,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.123,49	2,59	2.228,70	2,57	2.409,29	2,64
L. Real Estat	4.821,30	5,88	5.264,25	6,08	5.564,47	6,09
M,N. Jasa Perusahaan	792,41	0,97	850,92	0,98	910,62	1,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	863,45	1,05	919,80	1,06	985,65	1,08
P. Jasa Pendidikan	1.633,19	1,99	1.775,88	2,05	1.898,36	2,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	685,91	0,84	767,46	0,89	796,83	0,87
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.010,24	1,23	1.082,67	1,25	1.163,71	1,27
PDRB ADHK Kota Tangerang	81.965,33	100,00	86.590,52	100,00	91.425,92	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Tabel 1.3. Strukitur Perekonomia Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen)

Kelompok	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
Primer	1,36	1,35	1,39	1,39	1,38
Sekunder	46,74	45,86	45,34	41,85	39,93
Tersier	51,90	52,79	53,27	56,76	58,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Selama periode 2011-2015, perekonomian Kota Tangerang masih didominasi oleh kelompok lapangan usaha tersier. Tabel 1.3 menunjukkan semakin meningkatnya peranan kelompok lapangan usaha tersier. Kontribusi kelompok lapangan usaha tersier mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 51,90 persen pada tahun 2011 menjadi 58,69 persen pada tahun 2015. Kelompok lapangan usaha tersier didominasi oleh lapangan usaha



Transportasi dan Pergudangan, yang pada tahun 2011 berperan sebesar 16,82 persen, meningkat menjadi 28,88 persen pada tahun 2015.

Selama periode lima tahun terakhir telah terjadi pergeseran struktur lapangan usaha pada kelompok lapangan usaha sekunder. Pada tahun 2011 kelompok lapangan usaha sekunder yang didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan berperan sebesar 40,40 persen. Namun pada tahun 2015, peranan kelompok lapangan usaha sekunder turun menjadi 32,73 persen. Sebaliknya terjadi peningkatan peran kelompok lapangan usaha tersier, yang didominasi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

1.2.5.2 PDRB per Kapita

Untuk menunjukkan bagaimana suatu daerah memiliki potensi pembangunan dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapitanya atau dalam hal ini sama dengan PDRB perkapita. Dengan mengetahui perubahan besaran PDRB per kapita ini maka suatu daerah dapat dikatakan menikmati hasil pembangunan untuk setiap penduduknya atau tidak. Dapat diartikan pula bila PDRB perkapita meningkat berarti pemerintah telah menjalankan fungsi pembangunannya dengan baik. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang mencapai 61,61 juta rupiah, meningkat 11,23



persen bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 55,39 juta rupiah. Persentase peningkatan PDRB per kapita di tahun 2015 tidak sebesar tahun 2014 yang peningkatannya mencapai 14,36 persen.

Tabel 1.4. PDRB Kota Tangerang Tahun 2011 - 2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
PDRB per Kapita (Juta Rp)	40,78	43,92	48,43	55,39	61,61
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	110,20	118,69	130,89	149,69	166,49
Pertumbuhan PDRB per Kapita	10,20	7,70	10,28	14,36	11,23

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

1.2.5.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2015 Kota Tangerang mengalami perlambatan perekonomian. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2015 sebesar 5,58 persen, melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,64 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,64 persen. Hampir seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali untuk lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas terkontraksi negatif sebesar 3,06 persen.

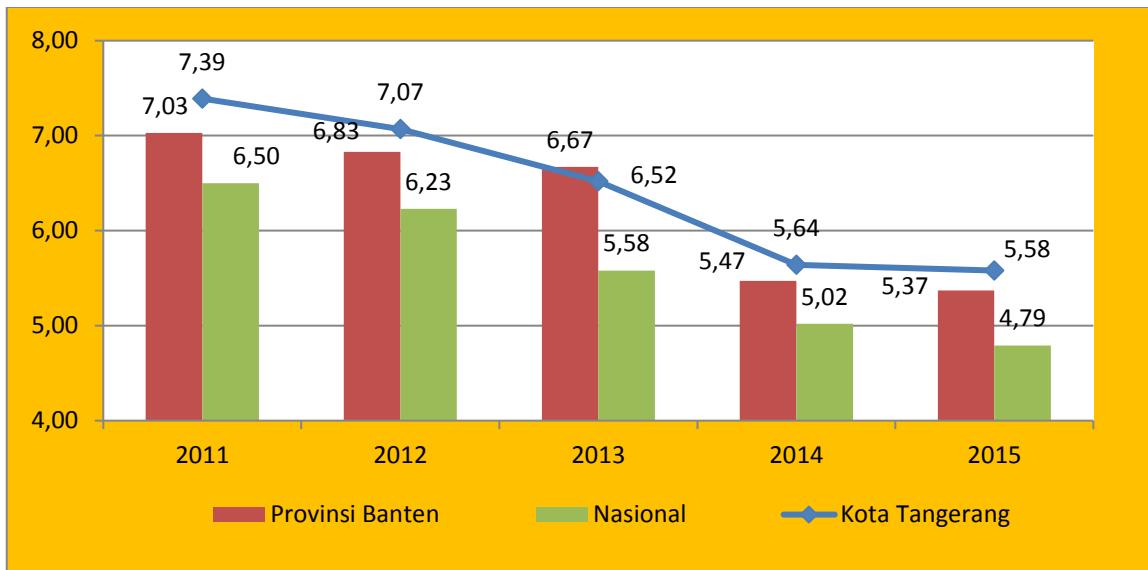
Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2011 – 2015

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2011	7,39	7,03	6,50
2012	7,07	6,83	6,23
2013	6,73	6,67	5,58
2014	5,64	5,47	5,02
2015	5,58	5,37	4,79

Sumber: BPS, 2016



Gambar 1.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2011 – 2015 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional



Keterangan:

LPE Kota Tangerang dan Banten 2011-2015 (Sumber: BPS Kota Tangerang dan Banten), LPE Nasional 2011-2015 (Sumber : BPS Pusat).

Selama periode 2011-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2013, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.



1.2.5.4 Inflasi

Kota Tangerang selama periode 2011-2016 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2011 tingkat inflasi ada di kisaran 3,78%, pada tahun 2012 tingkat inflasi yang ada mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,44%. Namun pada tahun 2013 dan 2014, tingkat inflasi Kota Tangerang mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 10,02% dan 10,03. Pada tahun 2015 dan 2016, inflasi Kota Tangerang mengalami penurunan menjadi sebesar 4,28% dan 2,65%.

Tabel 1.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2011-2016

Tahun	Inflasi (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2011	3,78	3,45	3,79
2012	4,44	4,37	4,50
2013	10,02	9,65	8,38
2014	10,03	10,20	8,36
2015	4,28	4,29	3,35
2016	2,65	2,94	3,02

Sumber: BPS RI dan Provinsi Banten

1.2.6 Bidang Keuangan Daerah

Desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang Kepala Daerah. Adanya penekanan terhadap aspek



pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp4.310.381.531.639,00 dengan komposisi 34,06% belanja tidak langsung dan 65,94% belanja langsung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

NO .	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	KOMPOSISI	
				ANGGARA N (%)	REALISAS I (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.468.158.464.066,32	1.391.182.779.546,00	34,06	38,29
2	Belanja Langsung	2.842.223.067.572,68	2.241.647.606.839,80	65,94	61,71
	Jumlah	4.310.381.531.639,00	3.632.830.386.385,80	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah, 2016



1.2.7 Bidang Sosial Budaya

1.2.7.1 Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Tangerang selama periode 2013-2015 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.952.396 jiwa, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.999.894 jiwa pada tahun 2014, atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,69%. Pada tahun 2015, jumlah penduduk bertambah menjadi sebesar 2.047.105 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,62%.

Tabel 1.8. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Tangerang Tahun 2013-2015

URAIAN	2013	2014	2015	Peningkatan/ Penurunan Periode 2014- 2015 (%)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.952.396	1.999.894	2.047.105	2,62
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.861	12.154	12.441	2,62
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,77	2,69	2,62	-0,07
Komposisi Penduduk, menurut:				
a. Jenis Kelamin				
* Laki-laki (orang)	997.398	1.021.298	1.045.113	2,56
* Perempuan (orang)	954.998	978.596	1.001.992	2,69
b. Angkatan Kerja (orang)	986.487	1.001.174	992.091	-0,91
* Jumlah yang bekerja (orang)	901.496	922.981	912.723	-1,11
* Jumlah Pengangguran (orang)	84.991	78.193	79.368	1,50
* Tingkat Pengangguran (%)	8,62	7,81	8,00	0,19
c. Pendidikan (penduduk usia > 15 th dan Ijazah tertinggi)	901.496	922.981	1.533.913	66,19
* Tidak/Belum Tamat SD/sederajat (orang)	76.742	73.583	101.810	38,36
* SD/MI/sederajat (orang)	126.539	137.249	151.634	10,48
* SLTP/MTs/sederajat (orang)	166.131	161.991	307.432	89,78
* SLTA/sederajat (orang)	404.257	424.384	705.826	66,32
* Perguruan Tinggi (orang)	127.827	125.774	267.211	112,45

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016



Selain pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) menyebabkan jumlah penduduk Kota Tangerang terus bertambah setiap tahun. Ditambah lagi peran Kota Tangerang sebagai penyangga ibukota DKI Jakarta menjadikan magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Tangerang, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Tangerang yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 164,55 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Tangerang pada tahun 2015 adalah 12.441 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 2,62% atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan tahun 2014.

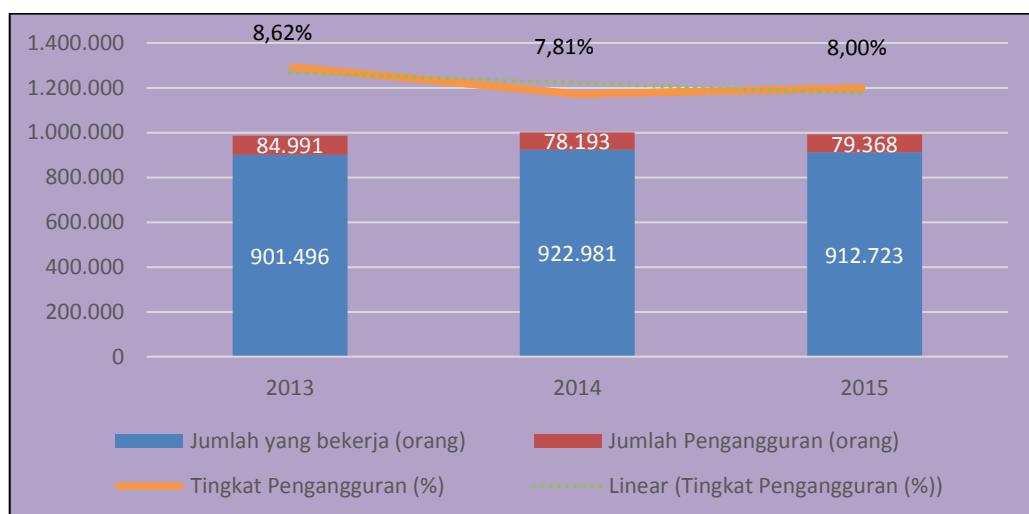
1.2.7.2 Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Tangerang menurun sebesar 0,91% selama periode tahun 2014-2015. Pada tahun 2014, angkatan kerja yang berada di Kota Tangerang tercatat sebanyak 1.001.174 orang dan menurun menjadi 992.091 orang di tahun 2015. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang di tahun 2014 yang sebesar 7,81%, mengalami lonjakan peningkatan di tahun 2015 menjadi sebesar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja yang ada tidak mampu diserap oleh jumlah



lapangan kerja. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi ini memerlukan perhatian dan penanganan ekstra agar kesempatan kerja dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang secara lebih luas. Pengembangan pola pertumbuhan inklusif yang memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang berkualitas (*decent work*) perlu lebih diprioritaskan.

Gambar 1.3. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang 2013-2015



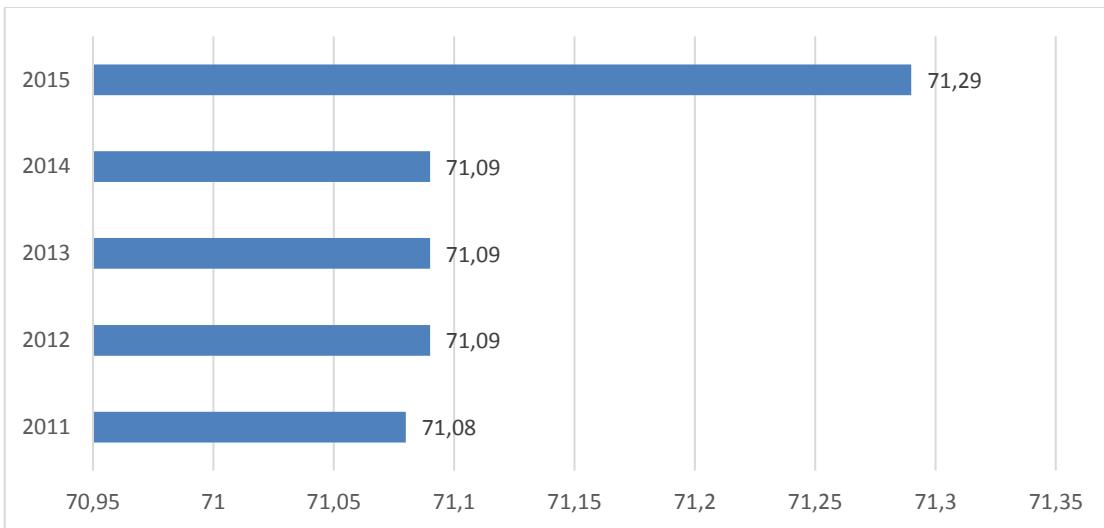
Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016

1.2.7.3 Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.



Gambar 1.4. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016

Angka Harapan Hidup pada Tahun 2011 sebesar 71,08 tahun dan pada Tahun 2015 menjadi 71,29 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,21 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 29,54%.

1.2.7.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah di Kota Tangerang diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kota Tangerang memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambaran didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:



Tabel 1.9. Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
Komponen IPM				
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,09	71,09	71,29
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,6	12,86	12,9
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,82	10,2	10,2
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	13.531	13.671	13.766
Indikator IPM				
1	Indeks Kesehatan	78,60	78,60	78,91
2	Indeks Pendidikan	67,73	69,72	69,83
3	Indeks Pengeluaran	79,38	79,69	79,90
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,04	75,87	76,08

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016

Perkembangan IPM Kota Tangerang selama ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 IPM Kota Tangerang sebesar 73,69, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 76,08. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 2,39 poin atau terjadi peningkatan sebesar 3,24%. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh stakeholder Kota Tangerang. Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Tangerang agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi.

1.2.7.5 Indek Pembangunan Gender (IDG)

dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar Indek Pembangunan Gender dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender.

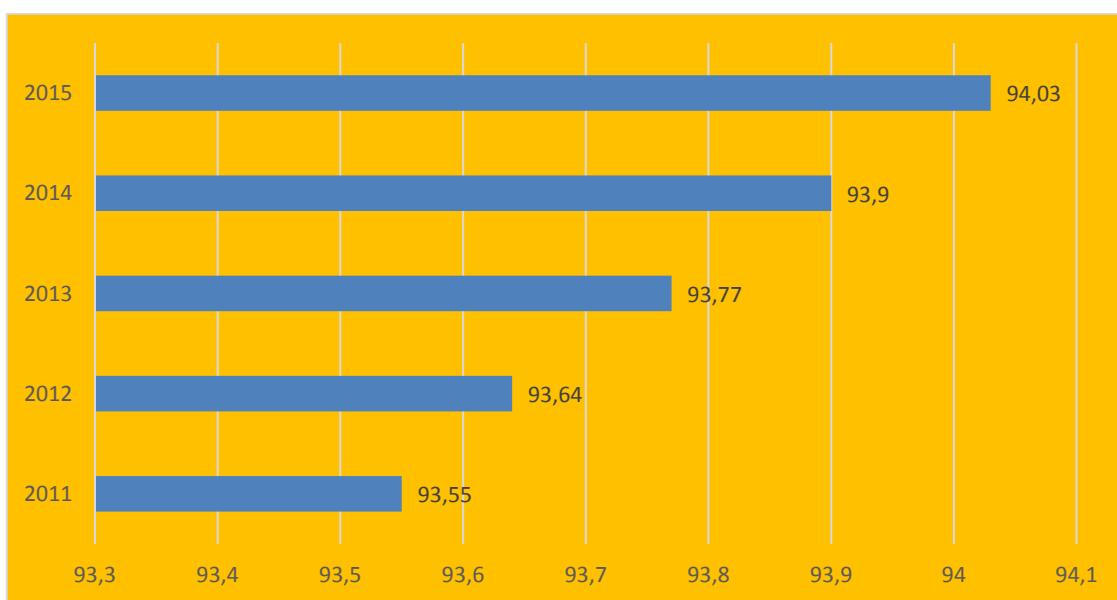
Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas



bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 94,03%. Nilai ini mendekati nilai ideal = 100. Artinya pencapaian pembangunan manusia di Kota Tangerang meskipun tinggi, namun masih terjadi ketidaksetaraan gender. Terdapat selisih 5,97 poin dari kondisi ideal.

Berikut perkembangan Indek Pembangunan Gender Kota Tangerang.

Gambar 1.5. Grafik Perkembangan IPG Kota Tangerang Periode Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016

1.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang



diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Tangerang dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

1.3.1.1 Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Tangerang dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

1.3.1.2 Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik

1.3.2 Kewenangan

Kota Tangerang sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan



sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 25 (dua puluh lima) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepemerintahan dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, rincian urusan tersebut, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang, dengan urusan wajib yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Lingkungan Hidup
- 4) Pekerjaan Umum
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perumahan
- 8) Kepemudaan dan Olahraga
- 9) Penanaman Modal,
- 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
- 11) Kependudukan dan Catatan Sipil,
- 12) Ketenagakerjaan,



- 13) Ketahanan Pangan,
- 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
- 16) Perhubungan,
- 17) Komunikasi dan Informatika,
- 18) Pertanahan,
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
- 21) Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 23) Sosial,
- 24) Kebudayaan,
- 25) Kearsipan, dan
- 26) Perpustakaan

sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

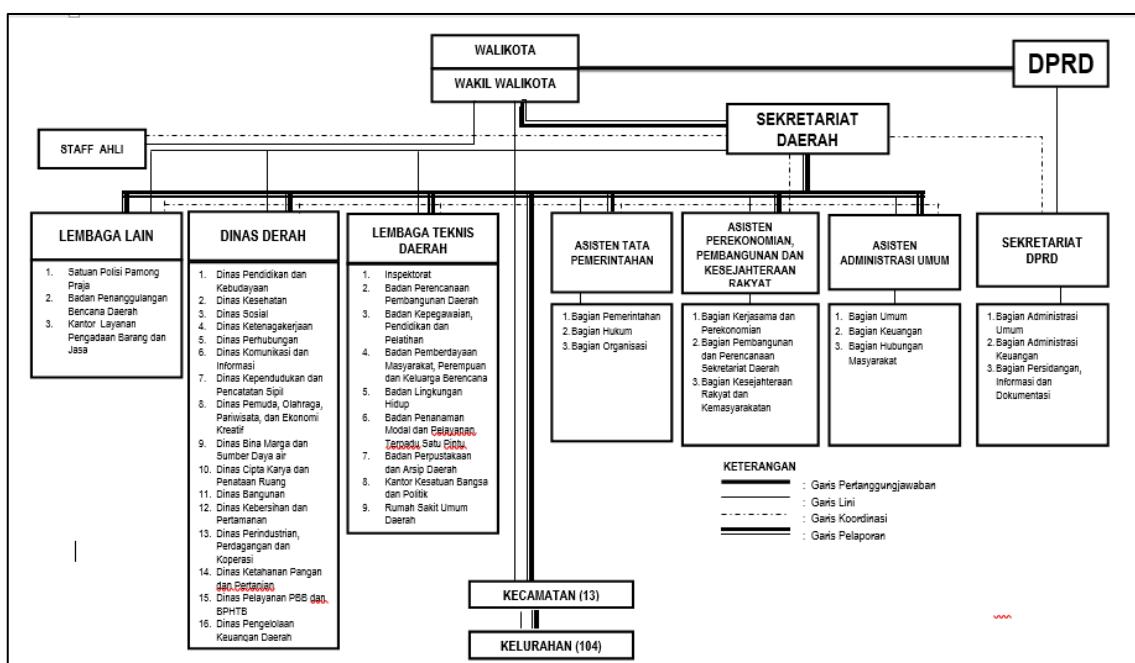
- 1) Kelautan dan Perikanan,
- 2) Pertanian,
- 3) Pariwisata,
- 4) Industri, dan
- 5) Perdagangan.



1.3.3 Struktur Organisasi

Kota Tangerang sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Banten, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Struktur organisasi Pemerintah Kota Tangerang dapat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.6. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang



Sumber: Perda Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2014 telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi serta tugas,pokok dan fungsi dari SKPD di Pemerintah Kota Tangerang. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar pembentukan dan struktur organisasi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas SKPD pada Tahun 2014. Namun Pada akhir Tahun



2014 telah dilakukan perubahan atau penataan terhadap 6 (enam) Peraturan Daerah dan 31 (tiga puluh satu) Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi Pemerintah Kota Tangerang yang berlaku untuk Tahun 2015. Secara normatif kelembagaan perangkat daerah Kota Tangerang sudah dapat dievaluasi setelah 2 (dua) tahun pembentukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Beberapa fakta dinamika perkembangan peraturan perundangan undangan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong Pemerintah Kota Tangerang melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah, antara lain: *Pertama*, adanya kepemimpinan baru pada Pemerintahan Kota Tangerang sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 dengan visi dan misi Kota Tangerang yang baru. *Kedua*, masih belum tuntasnya proses perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih terhitung sejak dikeluarkannya Surat Kemendagri Nomor 61/824/SD tertanggal 7 April 2011. *Ketiga*, adanya sejumlah aturan di bidang OPD yang memang mengharuskan diadakannya penataan ulang kelembagaan perangkat daerah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. *Keempat*, adanya masukan dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang untuk melakukan penataan ulang kelembagaan perangkat daerah yang pada umumnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada level bidang dan subbagian/ seksi/subbidang guna lebih meningkatkan efektivitas



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 terdiri atas:

1.3.3.1 Walikota dan Wakil Walikota

Setelah pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang yang baru pada Tahun 2013, Periode Tahun 2013 – 2018 Pemerintahan Kota Tangerang dipimpin oleh Walikota H. Arief R. Wismansyah dan Wakil Walikota H. Sachrudin.

1.3.3.2 Sekretariat Daerah

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten Tata Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan serta Asisten Administrasi Umum.

1.3.3.3 Sekretariat DPRD

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



1.3.3.4 Dinas Daerah

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dinas Daerah terdiri atas: **1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** (Perwal No.62 Tahun 2014), **2) Dinas Kesehatan** (Perwal No.63 Tahun 2014), **3) Dinas Sosial** (Perwal No.64 Tahun 2014), **4) Dinas Ketenagakerjaan** (Perwal No.65 Tahun 2014), **5) Dinas Perhubungan** (Perwal No.66 Tahun 2014), **6) Dinas Komunikasi dan Informasi** (Perwal No.67 Tahun 2014), **7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** (Perwal No.68 Tahun 2014), **8) Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif** (Perwal No.69 Tahun 2014), **9) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air** (Perwal No.70 Tahun 2014), **10) Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang** (Perwal No.71 Tahun 2014), **11) Dinas Bangunan** (Perwal No.72 Tahun 2014), **12) Dinas Kebersihan dan Pertamanan** (Perwal No.73 Tahun 2014), **13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi** (Perwal No.74 Tahun 2014), **14) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** (Perwal No.75 Tahun 2014), **15) Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB** (Perwal No.76 Tahun 2014), dan **16) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah** (Perwal No. 77 Tahun 2014).

1.3.3.5 Lembaga Teknis Daerah

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Lembaga Teknis Daerah terdiri



atas: **1) Inspektorat** (Perwal No.78 Tahun 2014), **2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** (Perwal No.79 Tahun 2014), **3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan** (Perwal No.80 Tahun 2014), **4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana** (Perwal No.81 Tahun 2014), **5) Badan Lingkungan Hidup** (Perwal No.82 Tahun 2014), **6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** (Perwal No.83 Tahun 2014), **7) Badan Perpustakaan Arsip Daerah** (Perwal No.84 Tahun 2014), **8) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** (Perwal No.85 Tahun 2014), **9) Rumah Sakit Umum Daerah** (Perwal No.86 Tahun 2014), **10) Satuan Polisi Pamong Praja** (Perwal No.87 Tahun 2014), **11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah** (Perwal No.88 Tahun 2014), **12) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa** (Perwal No.89 Tahun 2014)

1.3.3.6 Kecamatan dan Kelurahan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. **Kecamatan** (Perwal Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan). **Kelurahan** (Perwal Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan). Kota Tangerang memiliki 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan terdiri atas: 1) Tangerang dengan 8 Kelurahan, 2) Jatiuwung dengan 6 Kelurahan, 3) Batuceper dengan 7 Kelurahan, 4) Benda dengan 5 Kelurahan, 5) Cipondoh dengan 10 Kelurahan, 6) Ciledug dengan 8 Kelurahan, 7) Karawaci dengan 16 Kelurahan, 8) Periuk dengan 5 Kelurahan, 9)



Cibodas dengan 6 Kelurahan, 10) Neglasari dengan 7 Kelurahan, 11) Pinang dengan 11 Kelurahan, 12) Karang Tengah dengan 7 Kelurahan dan 13) Larangan dengan 8 Kelurahan.

1.3.3.7 Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan unit usaha pemerintah daerah yang secara badan hukum berada di luar unsur pemerintah daerah. Hal ini karena BUMD merupakan unsur kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga pengelolaan keuangannya di luar APBD Kota Tangerang. BUMD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang.

1.4 SISTEMATIKA LKIP 2016

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun penetapan kinerja yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi,dasar hukum terbentuknya organisasi, tujuan terbentuknya organisasi, aspek strategis organisasi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada organisasi (gambaran umum tupoksi) serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan potensi organisasi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai: Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang



ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kota Tangerang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/pembangunan daerah sesuai dengan hasil pengukuran organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi/penyerapan anggaran organisasi/OPD yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa/tahun mendatang.

Lampiran – Lampiran, penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.

Contents

BAB 1. PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 kondisi kota tangerang.....	1-7
1.2.1 Letak dan Kondisi Geografis	1-7
1.2.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi	1-7
1.2.3 Kondisi Topografi.....	1-8
1.2.4 Aparat Pemerintah.....	1-9
1.2.5 Perekonomian.....	1-12
1.2.6 Bidang Keuangan Daerah.....	1-18
1.2.7 Bidang Sosial Budaya	1-20
1.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI	1-25
1.3.1 Kedudukan	1-25
1.3.2 Kewenangan	1-26
1.3.3 Struktur Organisasi	1-29
1.4 Sistematika LKIP 2016.....	1-34
Gambar 1.1. Peta Kota Tangerang.....	1-8
Gambar 1.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2011 – 2015 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional	1-17
Gambar 1.3. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang Periode 2013-2015	1-22



Gambar 1.4. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2011-2015 1-23

Gambar 1.5. Grafik Perkembangan IPG Kota Tangerang Periode Tahun 2011-2015 1-25

Gambar 1.6. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang 1-29

Tabel 1.1. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2015 1-12

Tabel 1.2. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2015 1-13

Tabel 1.3. Strukitur Perekonomia Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen) 1-14

Tabel 1.4. PDRB Kota Tangerang Tahun 2011 - 2015 1-16

Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2011 – 2015 1-16

Tabel 1.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2011-2016 1-18

Tabel 1.7. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) 1-19



Tabel 1.8. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Tangerang Tahun 2013-2015 1-20

Tabel 1.9. Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2013-2015.....1-24



BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam bab ini menyajikan secara singkat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016, termasuk menyajikan gambaran singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada



tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), RPJM merupakan rencana strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, yang diharapkan akan dapat memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegalannya. Dengan visi, misi, dan strategi tersebut, diharapkan instansi pemerintah akan selaras dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.



2.2 VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Tangerang pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 yang termuat dalam RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005 - 2025 yaitu:

"KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH", dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2014-2018 mempunyai visi sebagai berikut:



**"TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI,
DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG
BERAKHLAKUL KARIMAH"**

Pernyataan visi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju

Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Mandiri

Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pembangunan daerah.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Dinamis

Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan jaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang



rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal dalam membangun Kota Tangerang.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera

Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan daerah.

Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhhlakul karimah

Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani (madaniyyah) dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur*).



2.3 MISI

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk pencapaian visi sebagaimana telah dikemukakan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) pernyataan misi Pemerintah Kota Tangerang. Misi tersebut sekaligus merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang terpilih adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan struktur birokrasi aparatur yang profesional, kompetensi, berkualitas, transparansi, objektifitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berintegritas, kompeten, dan professional. Melalui Tangerang LIVE yang salah satunya adalah E-CITY, pengembangan Kota Tangerang sebagai E-CITY terus dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembuatan aplikasi, website hingga penerapan kepada pegawai Kota Tangerang seperti E-Government, E-Kesehatan, E-Pendidikan,



E-Logistik dan E-Pengadaan, E-SPTPD, Akta Kelahiran Online, Pencaker Online, ATCS Dishub, Simpati RSUD dll. Dengan dibuatnya Tangerang Live Room (TLR) yang menghimpun seluruh aplikasi yang ada, maka pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat lagi.

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan memajukan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan, seperti perdagangan dan jasa, industry, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) sehingga mampu bersaing, serta memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan. Apalagi dengan adanya program *Investable (kota layak investasi)* diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berbagai kemudahan terus diberikan Pemerintah Kota Tangerang untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Tangerang yang sedang bertranformasi menjadi Kota Seribu Industri-Sejuta Jasa. Program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung kearah itu seperti layanan BPHTB Online, SIUP dan TDP Online. Kemudahan perijinan merupakan salah satu point dasar dalam menarik investor kesuatu daerah.Bila selama ini izin investasi harus menunggu lama, tetapi hal itu tak berlaku lagi di Kota Tangerang. Birokrasi yang rumit dan



lama akan berdampak pada malasnya investor menanamkan modalnya di suatu daerah.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing diera globalisasi

Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang berdaya saing, kualitas kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan, serta faktor pendukung lainnya. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan , Pemerintah Kota Tangerang menyediakan layanan informasi mengenai pendidikan dan kesehatan secara online.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

Penyediaan dan peningkatan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif. Sarana perkotaan merupakan faktor penunjang bagi kegiatan ekonomi Kota Tangerang.



Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung dalam rangka melaksanakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta seimbang antara lain dapat mengintegrasikan faktor lingkungan hidup dengan ekonomi dan sosial budaya, dapat menciptakan kondisi kemajuan yang seimbang antara peningkatan aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan Kota Sehat, bersih dan nyaman telah mengalokasikan anggaran disetiap OPD untuk enam tatanan menuju Kota yang sehat, bersih dan nyaman yaitu : pertama untuk sarana dan prasarana (urusan Pekerjaan Umum, LH dan Kebersihan), kedua tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri (urusan perbaikan gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan lainnya), ketiga ketahanan pangan dan gizi (urusan ketahanan pangan, kesehatan, pertanian, perikanan dan perkebunan), keempat kehidupan sosial yang sehat (urusan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan penyandang cacat dan trauma), kelima yaitu kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi yang berkaitan dengan perhubungan dan pekerjaan, keenam yakni industri dan perkantoran sehat.



2.4 TUJUAN SERTA SASARAN SEBELUM DAN SETELAH PENYELARASAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Lima misi Kota Tangerang 2014 – 2018 dijabarkan dalam 7 (tujuh) tujuan. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Pemerintah Kota Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Keterkaitan antara misi dan tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Penyelarasian Tahun 2016

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
1 Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)	1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)	1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik pertanahan	1 Terwujudnya penataan pertanahan
		2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah	2 Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil



TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
		3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis	3 Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik
		4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel	4 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
		5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah	5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
		6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Daerah	6 Terwujudnya aparatur yang profesional
		7 Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional	
		8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran	
		9 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk	



TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
		menghasilkan Peraturan Daerah	
		10 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Data/Informasi Pembangunan Daerah	7 Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas
		11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah	8 Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas
		12 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	9 Terwujudnya kearsipan yang berkualitas
		13 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah	
2 Memantapkan dan mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi yang modern sebagai pendukung pelaksanaan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi sebagai pendukung pelaksanaan sistem penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	14 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien	10 Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi
		15 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai (berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)	



Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah	3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian	16 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal	11 Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian
		17 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif	12 Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan
		18 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan	13 Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas
		19 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian	
		20 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah	14 Meningkatnya kepariwisataan
		21 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat	
		22 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen	15 Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen



TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
		23 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah	16 Terwujudnya industri yang maju

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
4 Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas	4 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas	24 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja 25 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 26 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga 27 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera 28 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial-masyarakat	17 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan 18 Meningkatnya aksesibilitas kesehatan 19 Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 20 Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana 21 Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial



TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
		29 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Ketenagakerjaan Daerah yang berbasis Keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan	22 Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja
		30 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	23 Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah
		31 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi	24 Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi
		32 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan	25 Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum
		33 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem penegakan peraturan daerah yang manusiawi dan berkeadilan	
		34 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	26 Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat
		35 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran kegemaran membaca masyarakat	27 Terwujudnya peningkatan kesadaran kegemaran membaca masyarakat



Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
5 Memantapkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan serta pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan, dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas	5 Meningkatkan sistem pengendalian banjir yang memadai	36 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahannya	
		37 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kependidikan, kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai	
		38 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai	
		39 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana kebinamargaan, dan keciptakaryaan daerah yang layak dan memadai	28 Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan 29 Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap
		40 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu	



TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
		41 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan memadai 42 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai	
6 Memantapkan dan mengembangkan sistem transportasi dan manajemen lalulintas perkotaan yang modern dan terpadu	6 Mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terpadu	43 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai	30 Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
7 Memantapkan dan mengembangkan pembangunan daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi	7 Meningkatkan kualitas penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	44 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana 45 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman	31 Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana 32 Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak



TUJUAN SEBELUM PENYELARASAN	TUJUAN SETELAH PENYELARASAN	SASARAN SEBELUM PENYELARASAN	SASARAN SETELAH PENYELARASAN
		46 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan	33 Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas
		47 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan	34 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan perencanaan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang tentang RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. RKPD Kota Tangerang Tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2016.



2.6 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Tangerang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.



Pelaksanaan penyelarasan terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tangerang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Setelah Penyelarasan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Target Akhir RPJMD 2018
1	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44	1,53
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP
3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	B
4	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00	100,00
5	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80	6,90
6	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.000	540.000
8	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75	2,15
9	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	37.460,57	40.967,26
10	Indeks pendidikan	Point	70,04	70,45
11	Indeks kesehatan	Point	78,98	79,11
12	Persentase penurunan PMKS	%	3,70	2,97
13	Persentase penduduk miskin	%	4,73	4,55
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,52
15	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Target Akhir RPJMD 2018
16	Luas genangan dan Banjir	Ha	240	225
17	Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00	100,00
18	Persentase rumah layak huni	%	98,70	99,43
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	K

2.8 PERJANJIAN KINERJA KOTA TANGERANG TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tanerang Tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2016. Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1				
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00
Misi 2				
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.000
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	37.460,57
Misi 3				
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	70,04
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	78,98
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	3,70
		Persentase penduduk miskin	%	4,73
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00
Misi 4				
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	240



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 5				
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	98,70
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W

2.9 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang yang berada pada SKPD kinerja yang diperjanjikan oleh Walikota Tangerang, dengan total belanja langsung urusan wajib sebesar Rp2.824.489.787.722,68 dan belanja langsung urusan pilihan sebesar Rp32.930.128.150,00.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016, komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.468.158.464.066,32	34,06
2	Belanja Langsung	2.842.223.067.572,68	65,94
	Jumlah	4.310.381.531.639,00	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016



Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No.	Sasaran	Anggaran	%
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	5.467.076.086,00	0,39
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	9.157.819.416,00	0,66
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	13.065.587.575,96	0,94
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1.512.277.518,00	0,11
5	Meningkatnya kepariwisataan	4.004.931.700,00	0,29
6	Terwujudnya industri yang maju	1.359.209.000,00	0,10
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	531.001.499.030,10	38,36
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	257.218.897.149,09	18,58
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	28.095.601.610,00	2,03
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	11.118.730.370,00	0,80
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	36.031.951.304,00	2,60
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	341.999.807.627,00	24,71
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	14.468.180.000,00	1,05
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	71.323.808.500,00	5,15
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	58.488.288.810,00	4,23
	Jumlah	1.384.313.665.696,15	100,00



Contents

BAB 2. PERENCANAAN dan perjanjian KINERJA.....	2-1
2.1 Rencana Strategis.....	2-1
2.2 VISI.....	2-3
2.3 MISI	2-6
2.4 Tujuan serta sasaRAn sebelum dan setelah penyelarasan.....	2-10
2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016.....	2-18
2.6 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016	2-19
2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	2-19
2.8 perjanjian kinerja kota tangerang tahun 2016	2-21
2.9 rencana anggaran tahun 2016	2-23

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Penyelarasan Tahun 2016

2-10

Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang
Setelah Penyelarasan

2-20

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun
2016

2-22

Tabel 2.4. Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2016

2-24



BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Tangerang selaku pengembang amanah masyarakat Kota Tangerang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018, RKT Tahun 2016, RKPD Tahun 2016, dan PK Tahun 2016.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan



diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Prosentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Metodologi dalam Pengukuran kinerja mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Tangerang sebagai kota industri serta pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran bisa jadi ditemui kinerja sasaran tidak tercapai secara maksimal. Dalam pengukuran sasaran, bagi kepentingan manajemen dilakukan penghitungan rata-rata atas setiap capaian indikator sasaran.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri



Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII-C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. $91\% \leq 100\%$ atau lebih	: Sangat Tinggi
2. $76\% \leq 90,99\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75,99\%$: Sedang
4. $51\% \leq 65,99\%$: Rendah
5. $\leq 50,99\%$: Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi



Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran



dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA TANGERANG TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2016

MISI 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44	1,59	110,42
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00
3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	100,00
4	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00	71,00	101,43

MISI 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
5	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80	6,86	100,88
6	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.000	536.963	101,31



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
8	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75	1,80	102,86
9	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	35.638,73	35.638,73	100,00

MISI 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing diera globalisasi

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
10	Indeks pendidikan	Point	69,83	69,83	100,00
11	Indeks kesehatan	Point	78,91	78,91	100,00
12	Persentase penurunan PMKS	%	3,70	3,90	105,41
13	Persentase penduduk miskin	%	5,04	5,04	100,00
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,00	110,71
15	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
16	Luas genangan dan Banjir	Ha	240	240	100,00
17	Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00	89,00	100,00

MISI 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
18	Persentase rumah layak huni	%	98,80	98,80	100,00
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	W	100,00

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Tangerang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.



Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang 2014-2018, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2014-2018 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Tangerang Tahun 2016 hasil Penyelarasan dengan Revisi RPJMD dan Indikator Kinerja Utama hasil penyelarasan RPJMD 2014-2018 berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 125 tentang Matriks Penyelarasan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2016

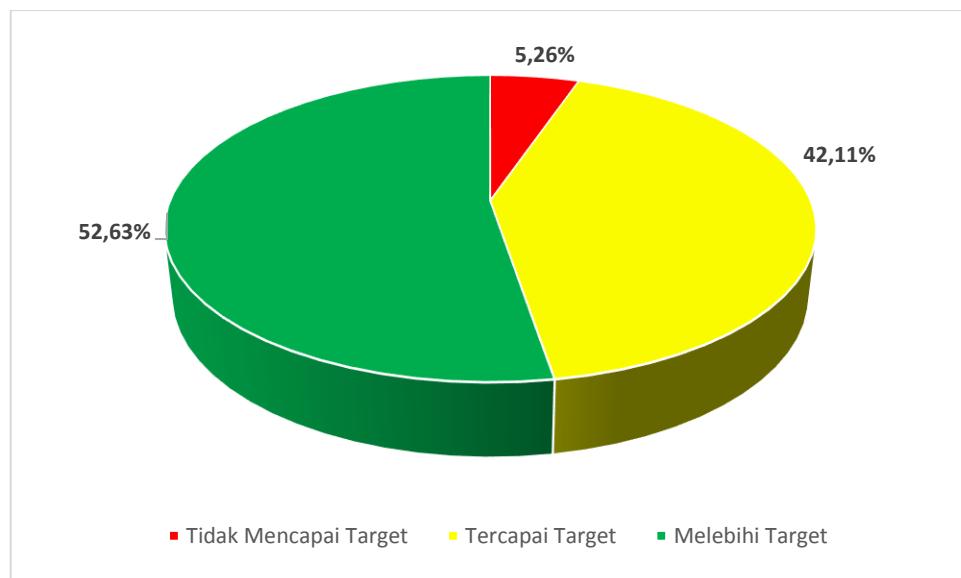
No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan, Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegras, Kompeten, Dan Profesional				
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	110,42	Melebihi Target
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,00	Seluruh Indikator Tercapai Target
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	101,43	Melebihi Target
Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi				
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	2	100,44	1 Melebihi Target dan 1 Tercapai Target



No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
5	Meningkatnya kepariwisataan	2	102,09	Seluruh Indikator Melebihi Target
6	Terwujudnya industri yang maju	1	99,83	Tidak Mencapai Target
Misi 3 : Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi				
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	100,04	Melebihi Target
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	100,08	Melebihi Target
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	2	102,70	1 Melebihi Target dan 1 Tercapai Target
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	110,71	Melebihi Target
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	1	100,00	Tercapai Target
Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas				
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	100,00	Tercapai Target
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	100,00	Tercapai Target
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Nyaman				
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	100,10	Melebihi Target
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	100,00	Tercapai Target



Gambar 3.1. Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2016



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2016 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:

3.3.1 **SASARAN I**

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2013	2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	0,65	1,26	1,47	1,44	1,58	109,64	1,53	103,36



Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayah Kota Tangerang, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam membiayai program pembangunan Pemerintah Kota Tangerang.

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya dapat menjadi mandiri.

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan, terdiri atas:

- A. Pajak daerah;
- B. Retribusi daerah;
- C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah.



Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak daerah berkontribusi paling besar tehadap PAD, tahun 2013 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 79,01%, tahun 2014 sebesar 83,33%, tahun 2015 sebesar 79,59% dan tahun 2016 sebesar 82,39%.

Pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Tangerang, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang meliputi 9 jenis pajak, yaitu:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Parkir;
- g) Pajak Air Tanah;
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; dan
- i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek retribusi :

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:



Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Terminal;
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- e) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- c) Retribusi Izin Trayek; dan



- d) Retribusi Izin Mempekerjakan Tanaga Asing.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu Deviden Bank BJB, Deviden PDAM dan Deviden PD Pasar.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) penerimaan jasa giro;
- c) Pendapatan bunga deposito;
- d) Tuntutan ganti kerugian daerah;
- e) pendapatan denda pajak;
- f) Penerimaan lain-lain;
- g) Dana Kapitasi JKN; dan
- h) Pendapatan dari BLUD.

Tabel 3.4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2013-2016 (RpTrilyun)

PAD	2013		2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	0,5	0,64	0,95	1,05	1,06	1,17	1,2	1,31



PAD	2013		2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Retribusi Derah	0,1	0,1	0,07	0,07	0,08	0,09	0,07	0,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Lain-lain PAD yang Sah	0,04	0,06	0,12	0,12	0,14	0,20	0,16	0,20
Jumlah	0,65	0,81	1,16	1,26	1,29	1,47	1,44	1,59

Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2016

PAD selama 4 tahun terakhir menunjukan perkembangan yang cukup baik, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat pada tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp0,81 trilyun, tahun 2014 sebesar Rp1,26 trilyun, tahun 2015 sebesar Rp1,47 trilyun dan tahun 2016 sebesar Rp1,59 trilyun. Dengan kata lain selama kurung waktu 4 tahun telah mengalami peningkatan atau bertambah sebesar Rp0,78 trilyun atau meningkat sebesar 96,30%.

Permasalahan

- a) Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya pemeriksaan pajak daerah karena kurangnya tenaga pemeriksa pajak;
- b) Belum tersedianya tenaga IT untuk melaksanakan pemeliharaan aplikasi sistem pajak daerah.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, yang dilaksanakan melalui:



1. Pendataan potensi wajib pajak baru;
 2. Penurunan reklame kain yang belum membayar pajak;
 3. Penempelan stiker/baliho segel terhadap media reklame yang belum berizin dan membayar pajak;
 4. Penyampaian surat teguran belum menyampaikan laporan omzet;
 5. Pemuthakhiran data wajib pajak (checker);
 6. Pemeriksaan pajak daerah;
 7. Penagihan tunggakan pajak daerah;
 8. Penyegelan terhadap wajib pajak daerah yang belum membayar pajak;
 9. Penempelan stiker lunas pajak reklame;
 10. Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah untuk meningkatkan aplikasi sistem pajak online;
 11. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak;
 12. Peningkatakan pelayanan pajak online berupa laporan omzet secara online dan pembayaran secara online;
 13. Melakukan rapat koordinasi terkait pajak penerangan jalan dengan PT. PLN Disjaya dan PT. PLN Disbanten per triwulan.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.



RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tingkat kemandirian daerah sebesar 31,76%, tahun 2014 meningkat menjadi 41,72%, tahun 2015 meningkat menjadi 43,49% dan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan, yaitu ditargetkan 45,57% terealisasi 46,90%.

Tabel 3.5. Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2013-2016

Pendapatan Daerah	2013		2014		2015		2016			
	Rp Trilyun	Kontri busi	Rp Trilyun	Kontri busi	Rp Trilyun	Kontri busi	Target		Realisasi	
							Rp Trilyun	Kontri busi	Rp Trilyun	Kontri busi
PAD	0,81	31,76	1,26	41,72	1,47	43,49	1,44	45,57	1,59	46,90
Dana Perimbangan	1,17	45,88	1,09	36,09	1,06	31,36	1,15	36,39	1,25	36,87
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,57	22,35	0,67	22,19	0,85	25,15	0,57	18,04	0,55	16,22
Jumlah	2,55	100	3,02	100	3,38	100	3,16	100	3,39	100

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2016

Dilihat dari struktur Pendapatan Daerah selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi paling besar dalam pembentuk Pendapatan Daerah Kota Tangerang adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2016, kontribusi PAD sebesar 46,90%; disusul Dana Perimbangan sebesar 36,87%; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 16,22%.



Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, kontribusi PAD mengalami tren peningkatan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif stabil. Hal ini tentunya berimplikasi pada menurunnya kontribusi Dana Perimbangan, dari 45,88% pada tahun 2013, dan terus menurun hingga 36,87% pada tahun 2016.

3.3.2 **SASARAN 2**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016					2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	B	75,00
Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	CC	100,00	80,00	75,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100,00		75,00

Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100%, dengan kategori **Sangat Tinggi**, masih menyisakan 25% untuk pencapaian kinerja sampai akhir RPJMD Tahun 2018.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:



3.3.2.1 OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Tangerang. Sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas, sistem manajemen dan administrasi keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2016 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015.

Dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas SKPD, dilakukan kuatifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut :

- ❖ Apabila mendapatkan "Tidak Memberikan Pendapat (TMP)", diberikan nilai 1 (satu);
- ❖ Apabila mendapatkan opini "Disclaimer", maka nilainya adalah 2 (dua);
- ❖ Apabila mendapatkan opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP), maka nilainya 3 (tiga); dan
- ❖ Apabila mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat).



Berdasarkan press release BPK Perwakilan Provinsi Banten, tanggal 31 Mei 2016, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pada tahun 2016, untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kota Tangerang kembali memperoleh opini WTP dari BPK-RI .

Pemberian opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 di Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016. Sebagaimana diketahui opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga penghargaan yang diraih untuk kesembilan kalinya tanpa putus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Apalagi Pemerintah Kota Tangerang menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP berbasis akrual dua kali secara berturut-turut di Provinsi Banten, setelah Pandeglang yang juga telah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2014 dengan mendapatkan opini *disclaimer* untuk Tahun Anggaran 2014 dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Tahun Anggaran 2015.



Tabel 3.7. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2015

No.	Pemda	OPINI Tahun								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3.	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
4.	Kab. Serang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Tangerang	WDP	WTP							
6.	Kota Cilegon	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Serang	-	WDP							
8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Tangerang Selatan	-	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP

Sumber: BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten

Pada Tahun 2016, target yang ditetapkan Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau nilai 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Tangerang untuk opini BPK atas LKPD Tahun 2015 mendapatkan opini WTP atau mendapatkan point (4) sesuai dengan LHP No.17a/LHP/XVIII.SRG/05/2016 dari BPK RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indikator dimaksud adalah : WTP (4) / WTP (4) x 100% atau sama dengan 100%, artinya capaian target indikator kinerja dimaksud dapat tercapai 100%.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Tangerang tetap menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Tahun 2016, sehingga dapat mempertahankan sampai dengan sepuluh kali berturut-turut.

Gambar 3.2. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015



Permasalahan

- a) Pengelolaan dan pengisian dokumen sumber belum seluruhkan dilaksanakan dengan tertib;
- b) Pengelolaan data transaksi aset dan keuangan belum seluruhkan dilaksanakan dengan tertib;;
- c) Pemahaman akan pentingnya menjaga konsistensi data belum sepenuhnya terbangun;
- d) Pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah belum merata;
- e) Perbedaan pengaturan dalam pelaksanaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan;



Upaya yang akan dilakukan

- a) Memberikan pemahaman dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b) Meningkatkan pengendalian intern, baik melalui pembenahan aturan dan kebijakan maupun peningkatan kemampuan APIP;
- c) Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

3.3.2.2 Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah

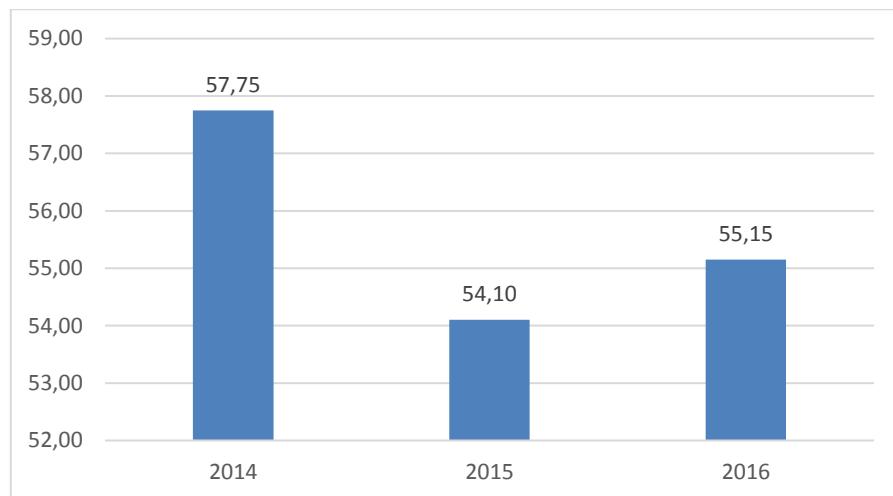
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang tahun 2016 adalah 55,15 atau kategori CC telah memenuhi target sesuai target RPJMD pada tahun 2016 adalah CC dan target B merupakan



target akhir RPJMD Tahun 2018. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Tangerang tahun 2016 adalah sesuai target atau 100%. Capaian tersebut naik sebesar 1,05 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menurun 3,65 poin dari 57,75 ke 54,10.

Gambar 3.3. CAPAIAN NILAI AKIP KOTA TANGERANG



Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2016

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang sejak tahun 2016 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang 2014-2016

Komponen Yang Dinilai	Bobot	2014		Bobot	2015		2016	
		Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot		Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot	Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot
Perencanaan Kinerja	35	19,07	54,49	30	19,83	66,10	19,83	66,10
Pengukuran Kinerja	20	12,11	60,55	25	10,96	43,84	11,35	45,40
Pelaporan Kinerja	15	9,02	60,13	15	9,08	60,53	9,42	62,80



Komponen Yang Dinilai	Bobot	2014		Bobot	2015		2016	
		Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot		Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot	Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot
Evaluasi Internal	10	5,90	59,00	10	4,31	43,10	3,75	37,50
Capaian Kinerja	20	11,65	58,25	20	9,92	49,60	10,81	54,05
Nilai Hasil Evaluasi		57,75			54,10		55,15	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC			CC		CC	

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2016

Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran hasil evaluasi LKIP Kota Tangerang Tahun 2016, secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP dibandingkan tahun 2015, kecuali komponen Evaluasi Internal yang mengalami penurunan. Komponen Evaluasi Internal menempati posisi kinerja terendah sebesar 37,50% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 66,10%.

Hasil evaluasi tersebut menunjukan:

- a) Penerapan SAKIP belum sepenuhnya menjadi bagian dari pembangunan manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja.
- b) Dokumen perencanaan kinerja (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja) belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukan keberhasilan pencapaian taraget
- c) Prosedure penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur



- d) Perjanjian kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan mengacu pada sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur
- e) Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja
- f) Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum pada keberhasilan pelaksanaan program
- g) Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja
- h) Masih berfokusnya pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome)

Rekomendasi / Upaya Perbaikan

1. Melakukan review terhadap dokumen RPJMD dan rencana strategis SKPD untuk memastikan dokumen dimaksud memberikan arah yang jelas sesuai prioritas daerah dalam rangka pencapaian target yang berorientasi outcome
2. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan SKPD mempertanggung jawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja, sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya
3. Memastikan perjanjian kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja maupun pemberian penghargaan
4. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja berkelanjutan
5. Membenahi dokumen Perencanaan kinerja termasuk pengukuran kinerja
 - a) Membuat matrik penyelarasan indikator sasaran RPJM 2014-2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, yang menjadi dasar untuk membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.



- b) Membuat matriks penyelarasan indikator sasaran Renstra SKPD 2014-2018;
- c) Membuat matrik penyelarasan indikator sasaran Renja SKPD 2016;
- d) Merevisi Perwal IKU Kota 2014-2018;
- e) Merevisi perwal IKU SKPD 2014-2018 yang ditetapkan tahun 2015, ditetapkan kembali di bulan agustus 2016 (isi berubah- nomor berubah)
- f) Merevisi Perubahan Jarkin Kota, ditetapkan dengan kepwal bulan nopember (isi berubah-nomor tetap)
- g) Merevisi Perubahan Jarkin SKPD, ditetapkan kembali pada bulan nopember (isi berubah-nomor tetap)

3.3.3 **SASARAN 3**

Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi
informasi

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	-	-	70,00	71,00	101,43	100,00	71,00

Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan integrasi aplikasi, keberadaan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan



Pemerintahan yang bersih dan transparan salah satunya adalah tercapainya Smartcity.

Jumlah aplikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan tahun 2016 sebanyak 51 aplikasi. Adapun aplikasi – aplikasi yang telah terintegrasi diantaranya sebagai berikut :

1. Dashboard LIVE berbasis web
2. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA)
3. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP)
4. Aplikasi SKP Online
5. Aplikasi eAbsensi
6. Aplikasi eOffice
7. Aplikasi Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (LAKSA)
8. Sistem Informasi Petugas Lapangan (SIGAP) berbasis web
9. Aplikasi Web GIS
10. Aplikasi Tangerang LIVE berbasis Android
11. Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEVLAP)



Kamis, 09-03-2017

Home

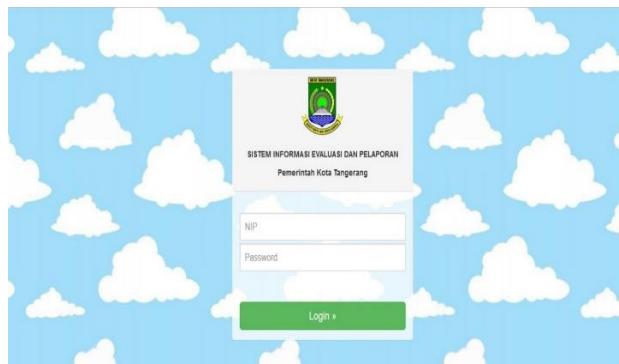
Silahkan Log In

Isikan nama pengguna

This connection is not secure. Logins entered here could be compromised. Learn More

Login

Copyright © 2015 - Prakom 11 - All Rights Reserved. Page rendered in **0.0086** seconds



Gambar 3.4. Tangerang Smart City Partnership



Permasalahan

- Aplikasi yang ada dibangun dengan menggunakan platform teknologi yang berbeda;



- b) Belum adanya tenaga ahli yang profesional dalam bidang integrasi multi platform;
- c) Masih adanya aplikasi yang belum terintegrasi.

Upaya yang telah dilakukan

- a) Melakukan pemetaan terhadap platform aplikasi yang berbeda;
- b) Melakukan integrasi terhadap beberapa aplikasi.

Upaya yang akan dilakukan berikutnya

- a) Menyusun regulasi tentang standarisasi platform aplikasi;
- b) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya ASN di bidang TIK;
- c) Melakukan Re-Desain aplikasi;
- d) Melakukan Kegiatan Integrasi Aplikasi dan Database e-Government dan Layanan Publik, untuk mempercepat lintas sektoral antar OPD yang satu dengan yang lain.

3.3.4 ***SASARAN 4***

Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	6,80	6,86	100,88	6,90	99,42
Tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100,44		99,71

Rata-rata capaian kinerja sasaran 12 melalui 2 indikator kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100,44%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.4.1 Jumlah penanaman modal (investasi)

Jumlah penanaman modal (investasi) dengan target sebesar Rp. 6,80 triliun dan terrealisasi sebesar Rp. 6,86 triliun atau 100,88% dari target, menunjukkan bahwa realisasi dari Penanaman Modal pada tahun 2016 melebihi target.

Pencapaian target indicator jumlah penanaman modal (investasi) terdiri dari Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Izin Usaha Penanaman Modal Asing (PMA).

Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham. Pada tahun 2014, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 51 izin dan PMDN 38 izin, realisasi penanaman modal mencapai Rp 10.57 triliun tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan realisasi penanaman Modal yaitu Rp 4.06 triliun. Hal ini salah satu dampak dari kondisi



perekonomian. Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi PMA dan PMDN. Perekonomian Indonesia keseluruhan periode 2010-2014 tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-2011) didorong oleh tingginya harga-harga komoditi (commodities super cycle) utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh kebijakan quantitative easing Amerika. Tetapi pada tahun 2015 lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro mengakibatkan melemahnya perekonomian Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada melemahnya harga-harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan turunnya ekspor Indonesia. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada realisasi investasi Izin Usaha setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.11. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Izin Usaha

Tahun	Data Hasil IU PMDN	Data Hasil IU PMA			
	Jumlah Izin	Jumlah Investasi Rp (Jutaan)	Jumlah Izin	Nilai Dalam USD (Ribuan)	Dalam Jutaan Rp (Kurs 1 USD = Rp. 12.500,-)
2014	38	3.837.046,7	48	538.854,8	6.735.685,0
2015	30	1.994.319,4	47	133.772,4	1.672.155,0
2016	35	3.652.727,1	51	239.514,8	6.735.685,0

Sumber Data : Business Inteligence (Bi) BKPM RI (Diolah)

Kurs 1 USD = Rp. 13,400 (sampai dengan tanggal 21 Desember 2015)



Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2016, beberapa perusahaan dari total realisasi penanaman modal meningkat karena adanya perluasan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya. Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanaman modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain juga didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. Memudahkan para investor dan melayani lebih baik lagi investor untuk penanaman modal. Berikut dalam tabel rekapitulasi Izin Usaha PMDN dan PMA pada tahun 2016:

Tabel 3.12. Tabel Rekapitulasi Izin Usaha Tahun 2016

No.	Bulan	PMDN		PMA		
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Ribuan USD (US\$)	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp) 1 USD = Rp.13,400,-
1	Januari	4	242.834,10	1	1.320,00	17.688,00
2	Februari	3	15.089,20	3	22.903,30	306.904,20
3	Maret	3	99.913,00	3	9.983,10	133.773,50
4	April	4	122.721,30	8	21.388,50	286.605,90
5	Mei	3	151.465,40	5	56.797,40	761.085,20
6	Juni	3	34.262,50	7	16.072,80	215.375,50
7	Juli	3	65.287,90	4	18.744,00	251.169,60
8	Agustus	1	1.527.594,10	2	2.200,00	29.480,00
9	September	1	563,70	3	8.956,10	120.011,70
10	Oktober	2	14.341,00	5	64.731,40	867.400,80
11	November	5	1.339.110,50	7	16.418,20	220.003,90
12	Desember	3	39.544,40	0	-	-
Jumlah		35	3.652.727,10	48	239.514,80	3.209.498,30



No.	Bulan	PMDN		PMA			
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Ribuan USD (US\$)	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp) 1 USD = Rp.13,400,-	
						JUMLAH PMDN + PMA	
No.		Bulan		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp)		
1	Januari	5		260.522,10			
2	Februari	6		321.993,40			
3	Maret	6		233.686,50			
4	April	12		409.327,20			
5	Mei	8		912.550,60			
6	Juni	10		249.638,00			
7	Juli	7		316.457,50			
8	Agustus	3		1.557.074,10			
9	September	4		120.575,40			
10	Oktober	7		881.741,80			
11	November	12		1.559.114,40			
12	Desember	3		39.544,40			
Jumlah		83				6.862.225,40	

Sumber: BPMPTSP, 2016

Dilihat dari tabel Nilai Investasi PMDN dan PMA, pada Tahun 2016 terdapat 83 proyek dengan total nilai Rp. 6,86 T.

Permasalahan

Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap



lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan LKPM.

Upaya yang akan dilakukan

Upaya untuk mendukung pencapaian target jumlah penanaman modal (investasi) dilaksanakannya kegiatan:

- a) Pameran investasi
- b) Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan mengundang 100 perusahaan,
- c) Pembuatan buku Profil investasi Daerah,
- d) Pengadaan sarana dan prasarana promosi (Leaflet, CD, Souvenir, Banner)

3.3.4.2 Tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu

Berikut Jenis izin dan waktu penyelesaian izin di BPMPTSP Tahun 2016

Tabel 3.13. Jenis izin dan waktu penyelesaian izin

No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
1	Izin Usaha Penanaman Modal	5
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi	14
3	Izin Tanda Daftar Gudang	14
4	Izin Industri (Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan)	7
5	Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	



No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
6	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	7
7	Izin Siup (Surat Izin Usaha Perdagangan)	7
8	Izin Reklame	7
9	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	
10	Penutupan Apotik	
11	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal	
12	Surat Izin Praktik Bidan	14
13	Izin Bangunan Makam	14
14	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner	14
15	Izin Optik	14
16	Izin Rumah Sakit	14
17	Izin Pembuangan Air Limbah	14
18	Izin Praktek Dokter Hewan Praktek Mandiri Atau Bersama	14
19	Izin Laboratorium Klinik Pratama	14
20	Izin Klinik Kecantikan	14
21	Izin Klinik	14
22	Izin Praktek Dokter Berkelompok	14
23	Surat Izin Praktik/Kerja Apoteker (SIPA/SIKA)	14
24	Izin Toko Obat	14
25	Izin Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	14
26	Izin Pemakaian Generator Set (Genset)	1
27	Izin Kursus	14
28	Izin Pkbm	
29	Izin Praktek Bidan	14
30	Izin Apotek	14
31	Praktek Dokter Gigi, Umum, Spesialis	14
32	Paud Non Formal	
33	Izin Lembaga Pelatihan Kerja / BLK LN	
34	Izin Lembaga Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	
35	Izin Pembangunan Instalasi Kebakaran (Alarm Kebakaran)	7



No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
36	Izin Perpakiran	7
37	Izin Gangguan (HO)	10
38	Lembaga Pelatihan Kerja	7
39	Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	7
40	Izin Pemakaian Bejana Bertekanan	7
41	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	7
42	Izin Pemakaian Pesawat Angkat Dan Angkut	7
43	Izin Penggunaan Katel Uap	1
44	Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir	7
45	Izin Trayek	7
46	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	14
47	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14
48	Izin Layak Huni Dan Akta Pertelaan	

Sumber: BPMPTSP

Realisasi Perizinan tahun 2016 DPMPTSP telah melayani 44 jenis perijinan dengan total jumlah ijin untuk Bidang Pembangunan sebanyak 3.803 Izin, untuk Bidang Pemkes sebanyak 6.516 izin, untuk Bidang Penanaman Modal sebanyak 11.786 Izin. Secara keseluruhan izin yang selesai dilaksanakan di BPMPTSP pada Tahun 2016 sebanyak 22.105 Izin.

No	SK IZIN	Jumlah
I	Bidang Pembangunan	3.803
1	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	883
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.096
3	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	824
4	Izin Layak Huni dan Akta Pertelaan	0

No	SK IZIN	Jumlah
II	Bidang Pemerintahan & Kesra	6.516



No	SK IZIN	Jumlah
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	67
2	Izin Laboratorium Kesehatan	6
3	Izin Toko Obat	10
4	Izin Apotek	108
5	Penutupan Apotek	20
6	Izin Klinik dan Izin Penutupan Klinik	60
7	Surat Izin Praktek/Kerja	
	Bidan	244
	Apoteker	245
	Dokter Umum	559
	Dokter Gigi	196
	Dokter Spesialis	460
8	Penghentian Praktek/Kerja	
	Bidan	2
	Apoteker	46
	Dokter Umum	64
	Dokter Gigi	6
	Dokter Spesialis	51
9	Izin sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	82
10	Izin Pembuangan Limbah Cair/Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	25
11	Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan	
	Penggunaan Tanah Baru	401
	Penggunaan Tanah Makam Betet	1
	Penggunaan Tanah Makam Daftar Ulang	380
	Bangunan Makam	101
	Penggunaan Tanah Makam Cadangan	17
12	Izin Praktek Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama	5
13	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner	0
14	Izin Usaha Penyedotan Limbah Tinja	0
15	Izin Operasional Rumah Sakit	8



No	SK IZIN	Jumlah
16	Izin Penetapan Kelas Rumah Sakit	8
17	Penerbitan surat Izin Optik	3
18	Izin Trayek	148
19	Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir	144
20	Izin Penggunaan Ketel Uap	149
21	Izin Pemakaian Pesawat Angkat Angkut	1.355
22	Izin Pesawat Tenaga Produksi	259
23	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	72
24	Izin Pemakaian Bejanaan Bertekan	301
25	Izin Lift	149
26	Izin Tempat Penampungan Calon tenaga Kerja Indonesia	2
27	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	7
28	Izin Gangguan	691
29	Izin Perparkiran	7
30	Izin Alarm Kebakaran	52

No	SK IZIN	Jumlah
III	Bidang Penanaman Modal	11.786
1	Izin Industri (Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan)	52
2	Izin Penanaman Modal (Izin Prinsip) dan Izin Usaha	44
3	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3.617
4	Tanda Daftar Perusahaan	3.562
5	Izin Reklame	4.013
6	Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang terdiri atas :	
	a. TandaDaftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman /Restoran	32
	b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata/ Hotel	4
	c. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	24
	d. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi	3
	a. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	0
	f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Usaha	0
	g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	6



No	SK IZIN	Jumlah
	h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	0
	i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran	2
	j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	0
	k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	0
	l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	0
	m. Tanda Daftar Usaha Spa	0
7	Izin Toko Modern	12
8	Izin Usaha Jasa Kontruksi	159
9	Tanda Daftar Gudang	17
10	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	239

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu dilaksanakannya kegiatan:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
- 2) Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan perizinan di Kecamatan,
- 3) Melaksanakan Perizinan jemput Bola dengan adanya Mobil Keliling,
- 4) Melaksanakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Pembuatan izin SIUP dan TDP secara online.
- 5) Melaksanakan Kegiatan Penataan Ruang untuk memberikan kenyamanan kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan.
- 6) Melaksanakan kegiatan ISO 9001-2008



- 7) SOP DPMPTSP sudah disusun dan diharapkan dapat berjalan dengan efektif

Untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien kepada masyarakat Kota Tangerang dalam mengurus perijinan, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan berbagai macam inovasi. Pada tahun 2016 telah dibuat dua aplikasi online perijinan, yakni Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

Untuk tahun 2017 mendatang akan ada 18 aplikasi online tentang perizinan, yakni:

1. Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis;
2. Surat Izin Praktik Bidan;
3. Surat Izin Praktik Apoteker;
4. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
5. Surat Izin Klinik;
6. Surat Izin Apotek;
7. Surat Izin Toko Obat;
8. Surat Izin Optik;
9. Izin Laboratorium Kesehatan
10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
11. Izin Pendirian Sekolah;



12. Izin Pendirian Kursus;
13. Izin Pembuangan Air Limbah;
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
15. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
17. Tanda Daftar Gudang;
18. Surat Izin Praktik Paramedis Veteriner.

Pemasalahan

- a) SDM yang Kurang professional
- b) Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengurusan perizinan

Upaya yang akan dilakukan

- a) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
- b) Melaksanakan Sosialisasi Pelayanan perizinan di Kecamatan,
- c) Melaksanakan Perizinan Jemput Bola dengan adanya Mobil Keliling,
- d) Melaksanakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Pembuatan izin SIUP dan TDP secara online.
- e) Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan 21 jenis perizinan yang sudah menggunakan aplikasi sistem dan pemukthiran Website SKPD.



3.3.5 **SASARAN 5**

Meningkatnya Kepariwisataan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	478.715	500.493	530.000	536.963	101,31	540.000	99,44
Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,75	1,80	102,86	2,15	83,72
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						102,09		91,58

Rata-rata capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran 5 melalui 2 indikator adalah sebesar 102,09%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.5.1 **Jumlah kunjungan wisatawan**

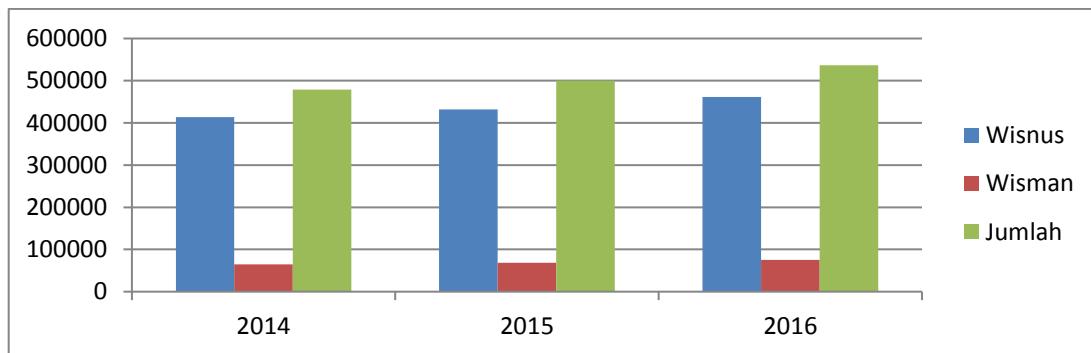
Jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2016 sebanyak 530.000 orang dan direalisasikan sebanyak 536.963 orang atau 101,31% dari target 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang dari realisasi tahun sebelumnya (2015) yang berjumlah 500.493 orang.



Tabel 3.15. Jumlah Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016

Kategori Wisatawan	Tahun		
	2014	2015	2016
Wisnus	413.743	431.743	461.502
Wisman	64.972	68.750	75.461
Jumlah	478.715	500.493	536.963

Gambar 3.5. Jumlah Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016



Pada grafik di atas terlihat bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 disebabkan adanya event-event tingkat nasional dan internasional. Untuk tingkat nasional ada lomba dayung pada gelaran festival cisadane yang diikuti oleh 15 kab/kota se Indonesia dan olimpiade matematika dan sain se Indonesia (OMSI). Sedangkan untuk tingkat internasional ada lomba International Matematic and Sains Olympiad (IMSO). Di samping event nasional dan internasional ada pula event local yang menarik wisatawan ke Kota Tangerang, seperti culinary night dan festival al a'zhom.



Gambar 3.6. International Folklore Internasional



Gambar 3.7. International Matematic and Sains Olympiad (IMSO)



3.3.5.2 Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan (rata-rata lama menginap di hotel)

Kinerja sasaran ini dicapai dengan target tahun 2016 selama 1,75 hari dan direalisasikan selama 1,80 hari atau 102,86% dari target 100,00%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang datang dan menginap di Kota Tangerang dari tahun 2015 dengan capaian 1,55 hari. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan hotel yang semula berdasarkan hasil pendataan tahun 2015 berjumlah 52 dan di tahun 2016 bertambah 2 hotel sehingga menjadi 54 hotel.



Permasalahan/Hambatan

Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut:

- a) Objek-objek wisata di Kota Tangerang banyak belum tertata, terutama wisata tirta seperti situ bulakan, situ gede, situ cipondoh, situ cangkring dan sungai cisadane, karena terbentuk izin dalam pengelolaan.
- b) Minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan event-event tingkat nasional dan internasional di Kota Tangerang;
- c) Belum maksimalnya kerja sama antara pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata dengan PHRI dan asosiasi travel (ASITA) baik tingkat kota maupun provinsi untuk promosi daya tarik wisata di Kota Tangerang;
- d) Minimnya sarana dan prasarana pementasan seni dan budaya di Kota Tangerang;
- e) Belum adanya jadwal kegiatan yang baku untuk festival-festival di Kota Tangerang, sehingga wisatawan akan kesulitan menyiapkan waktu untuk melakukan kunjungan ke Kota Tangerang;
- f) Belum mempunyai paket wisata yang dapat dijual.
- g) Belum tersosialisasikannya kegiatan festival cisadane masuk dalam "***Seven Woderful Banten***".



Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja jumlah rata-rata lama wisatawan menginap di hotel adalah sebagai berikut:

- a) Wisatawan lebih banyak menginap di hotel bintang 3 ke bawah.
- b) Wisatawan lebih banyak memanfaatkan waktu *weekend* untuk menginap di hotel.
- c) Hotel-hotel yang ada di Kota Tangerang lokasinya dekat bandara Sukarno Hatta dan wisatawan bertemu ke hotel-hotel tersebut sekedar transit.
- d) Kurangnya kerja sama dinas pariwisata dengan pihak hotel dan travel

Upaya Yang Akan Dilakukan Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

- a) Menata objek wisata tirta seperti situ bulakan, situ gede, situ cipondoh, situ cangkring dan sungai cisadane.
- b) Membangun objek wisata baru kampung beksi.
- c) Memperbanyak kegiatan-kegiatan dan event-event tingkat nasional dan internasional di Kota Tangerang;
- d) Memaksimalkan kerja sama antar pemerintah dengan PHRI dan ASITA kota dan provinsi terkait promosi daya tarik wisata Kota Tangerang



- e) Membangun sarana dan prasarana untuk atraksi seni dan budaya;
- f) Merumuskan dan menyusun jadwal yang baku untuk kegiatan-kegiatan festival di Kota Tangerang.
- g) Promosi besar-besaran kegiatan festival cisadane sebagai "**seven woderful Banten**"

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja jumlah rata-rata lama wisatawan menginap adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan kerja sama dengan PHRI dan ASITA dalam merancang paket offering yang menarik kepada konsumen.
- b) Memfasilitasi pengusaha hotel melakukan promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisman/ wisnus pada saat *weekdays/low seasons*.
- c) Meningkatkan kerja sama pemerintah dengan pihak hotel dan travel.
- d) Melakukan pembinaan secara berkala mengenai standar pelayanan dan kenyamanan hotel

3.3.6 **SASARAN 6**

Terwujudnya Industri Yang Maju

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	34.468,97	35.700,00	35.700,00	35.638,73	99,83	40.967,26	86,99

Indikator sasaran Nilai PDRB sektor industri, menggunakan data tahun 2015, dikarenakan Nilai PDRB tahun 2016 belum di publish oleh BPS. Dan pencapaian indicator ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015, walaupun pencapaiannya masih pada kategori sangat tinggi.

Kategori Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling berperan dalam perekonomian Kota Tangerang. Walau selama lima tahun kontribusinya selalu menurun, namun besaran kontribusinya masih yang paling tinggi diantara semua lapangan usaha yang bergerak di Kota Tangerang. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2015 sebesar 38,98 persen, dengan sub lapangan usaha yang menyumbang paling tinggi adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (7,76 persen), kemudian diikuti oleh Industri Tekstil dan Pakaian jadi (6,89 persen).

Tabel 3.17. Perkembangan Nilai PDRB ADHK sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan

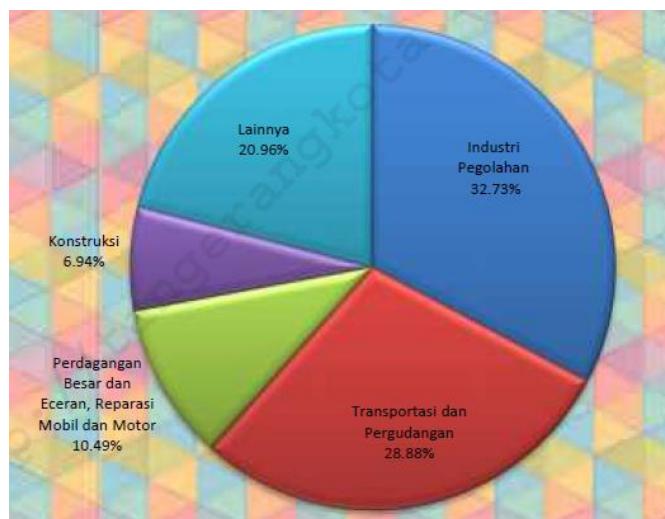
Tahun	Rp Miliar	Kontribusi (%)
2010	28.716,79	42,91
2011	29.642,89	41,25
2012	31.518,62	40,96



Tahun	Rp Miliar	Kontribusi (%)
2013	33.897,40	41,36
2014	34.468,97	39,81
2015	35.638,73	38,98

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016

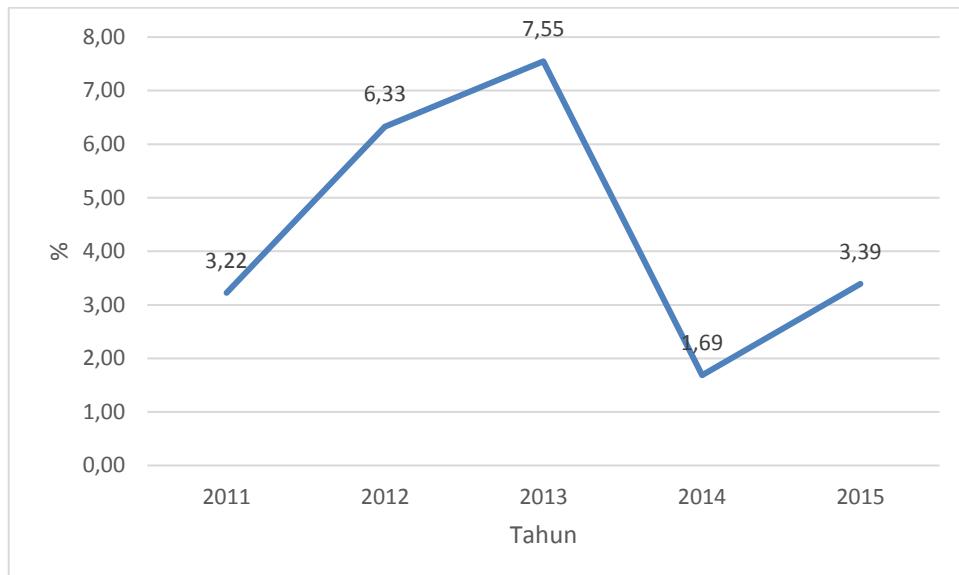
Gambar 3.8. Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kota Tangerang (persen), 2015



Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 3,39 persen. Sub lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Alat Angkutan yaitu sebesar 8,46 persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki dan Industri Logam Dasar yaitu masing-masing sebesar 6,78 persen dan 6,57 persen. Apabila dilihat menurut lapangan usahanya pada tahun 2015, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangsih tertinggi sebesar 32,73 persen.



Gambar 3.9. Pertumbuhan Ekonomi kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK Kota Tangerang 2011-2015



3.3.7 **SASARAN 7**

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran 7

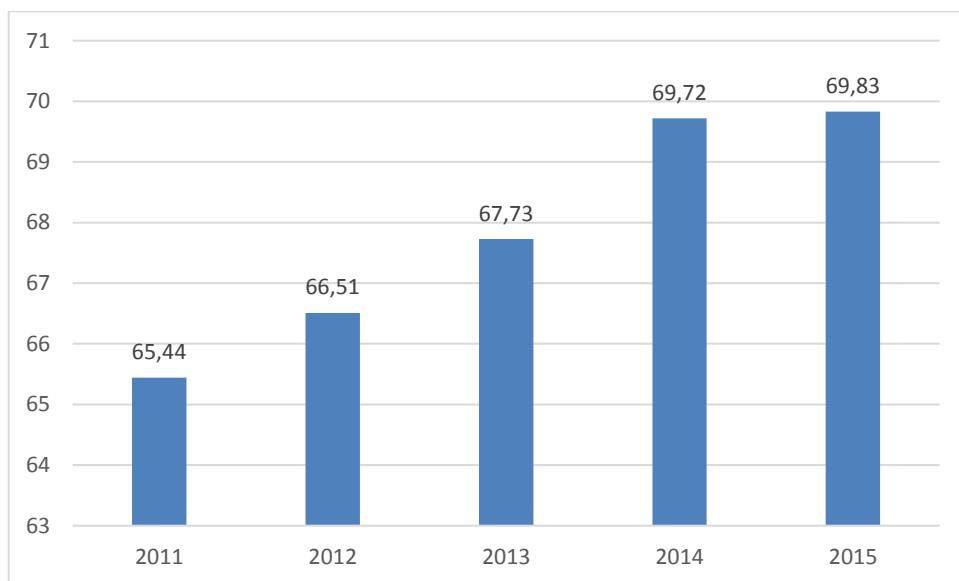
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks pendidikan	Point	69,71	69,80	69,80	69,83	100,00	70,45	99,12

Indikator sasaran Indeks pendidikan, menggunakan data tahun 2015, dikarenakan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2016 belum di publish oleh BPS. Dan pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015.



Indeks Pengetahuan atau Indeks Pendidikan Kota Tangerang tahun 2015 adalah 69,83. Angka ini meningkat sebesar 0,11 poin dari tahun 2014. Namun dari angka indeks ini masih jauh dari angka maksimalnya (100), sehingga dapat dikatakan pencapaian indikator pengetahuan di Kota Tangerang masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mempunyai kesempatan dan kemauan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.

Gambar 3.10. Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2016

Pencapaian pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai kemajuan suatu masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah menyerap informasi-informasi kemajuan peradaban, sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk daerah yang bersangkutan. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi.



Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan sangat penting untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan dan berkualitas unggul bagi kemajuan suatu bangsa.

Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha.

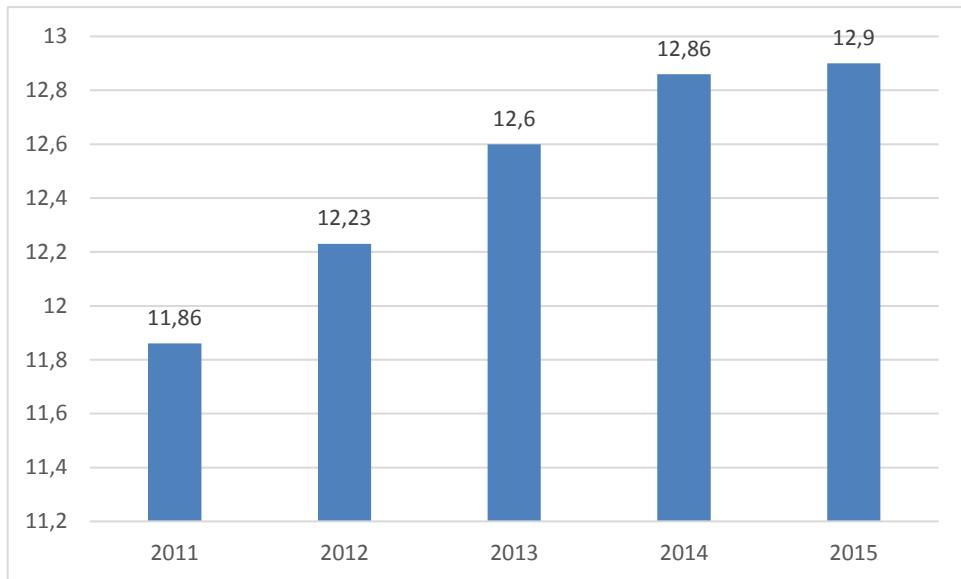
Peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan, dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Kedua indikator ini dalam pembangunan manusia mewakili aspek pengetahuan, yang keberhasilannya memerlukan dukungan kuat dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tangerang pada tahun 2015 adalah 12,90 tahun, berarti setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun pada tahun 2015, dapat berharap untuk bersekolah selama 12 tahun lebih, atau kuliah sampai semester I.



Gambar 3.11. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tangerang



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2016

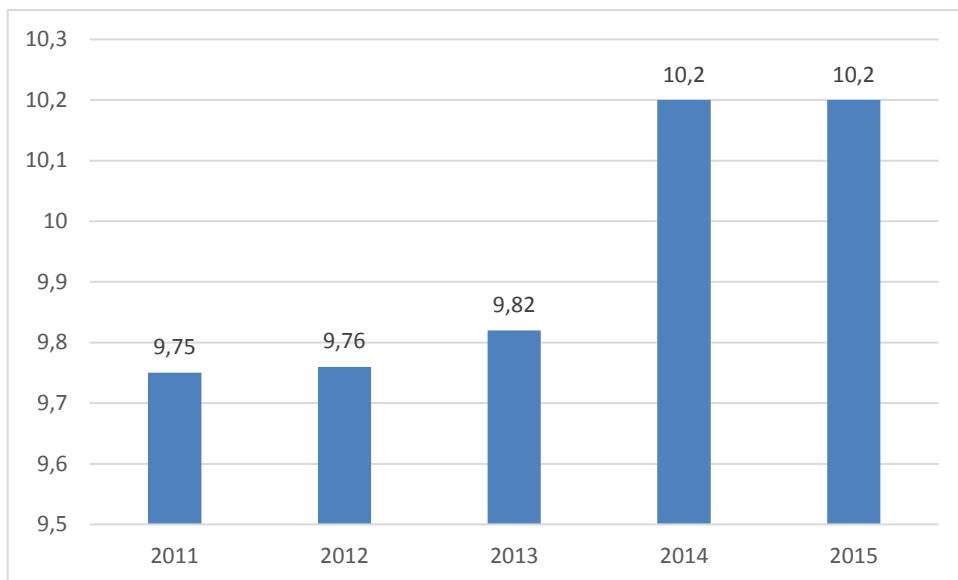
Rata-rata lama sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka RLS yang dicapai Kota Tangerang pada tahun 2015 adalah 10,20 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Tangerang yang berumur 25 tahun ke atas, bersekolah hingga setara kelas II SMU. RLS Kota Tangerang tertinggi kedua di Banten setelah Kota Tangerang Selatan yang mencapai 11,57 tahun, atau setara dengan bersekolah hingga setara kelas III SMU.



Gambar 3.12. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2016

Program prioritas yang diselenggarana pada urusan wajib pendidikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Tangerang Cerdas Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.168.910.000,00 kegiatan ini bertujuan menurunkan angka putus sekolah dan rawan putus sekolah bagi siswa tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar yang berjumlah 8.738-siswa miskin berdasarkan data hasil verifikasi.
- b) Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.130.088.900,00 kegiatan ini bertujuan menurunkan angka putus sekolah dan rawan putus sekolah bagi siswa tidak mampu



pada jenjang pendidikan menengah yang berjumlah 2.221-siswa miskin berdasarkan data hasil verifikasi.

- c) Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.484.990.050,00 Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 340-Sekolah SD/MI Negeri.
- d) Biaya Operasional Pendidikan SMPN/MTSN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.242.995.000,00 Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada 27-sekolah SMP/MTs Negeri
- e) Biaya Operasional Pendidikan SMA/SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.350.169.742,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada 15-sekolah SMA negeri dan 9- SMK Negeri.
- f) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 662.779.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan operasional siswa putus sekolah berupa pengadaan atk dan buku raport siswa putus sekolah Paket A, B dan C sebanyak 3.300-siswa/warga belajar.

3.3.8 **SASARAN 8**

Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan



Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2013	2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks kesehatan	Point	78,60	78,60	78,85	78,85	78,91	100,08	79,11	99,74

Indikator sasaran Indeks kesehatan, menggunakan data tahun 2015, dikarenakan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2016 belum di publish oleh BPS. Dan pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015.

Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup merupakan turunan dari Angka Harapan Hidup yang telah dicapai dibanding kondisi 'ideal' sesuai standar UNDP yaitu 85 tahun (100 persen). Indikator harapan hidup digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan. Yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 Indeks harapan hidup masyarakat di Kota Tangerang mencapai 78,91 persen.

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup dan sarana transportasi yang lancar sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang



ada sangat membantu masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi, tetapi yang tak kalah penting adalah mengingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

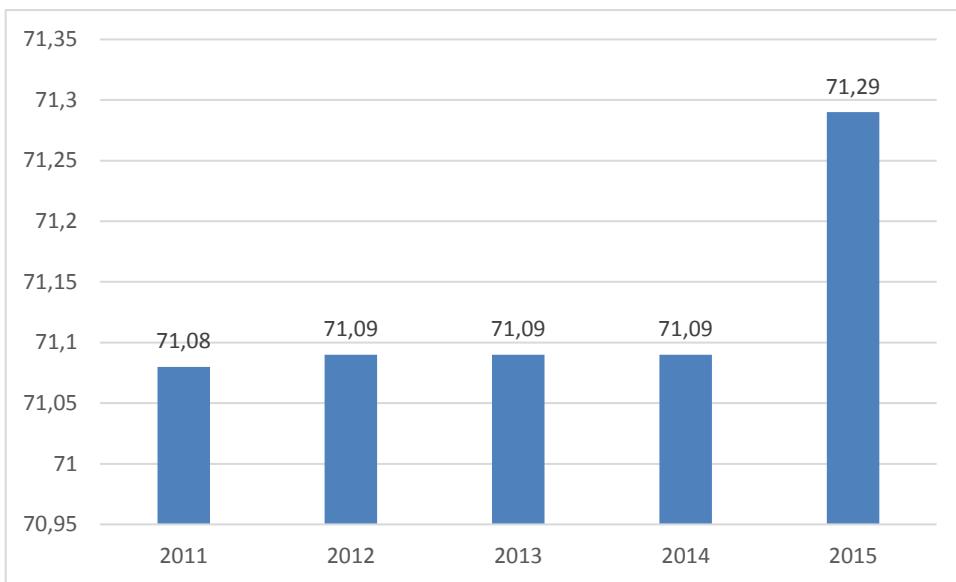
Angka harapan hidup

Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat diharapkan kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin besar/lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.

Angka harapan hidup di Kota Tangerang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari 71,08 tahun pada tahun 2011 menjadi 71,29 tahun pada tahun 2015. Angka harapan hidup sebesar 71,29 tahun dapat diartikan bahwa peluang hidup bayi yang lahir di Kota Tangerang pada tahun 2015 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 71 tahun.



Gambar 3.13. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang

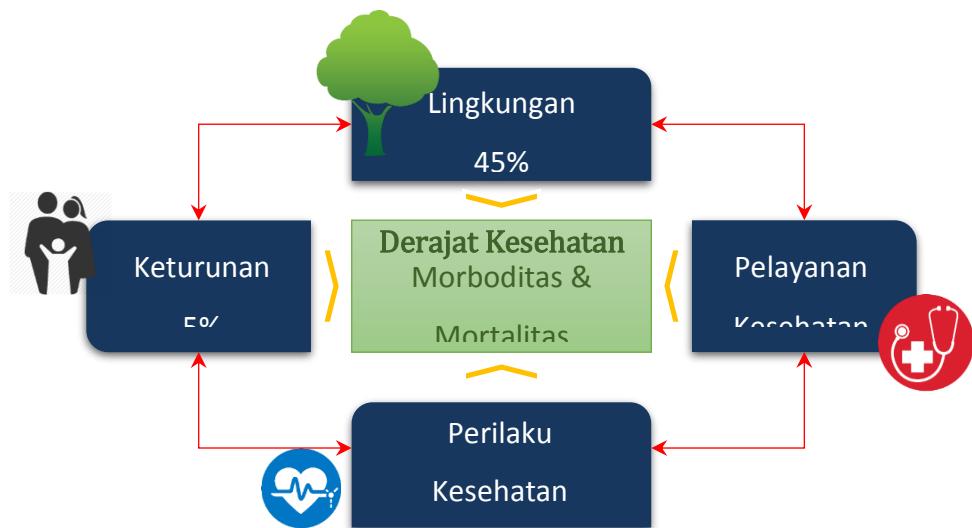


Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2016

Salah satu komponen dalam penentuan kualitas hidup manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sedangkan perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan

sebesar 5 persen. Berikut ilustrasi mengenai konsep Henrik L. Blum mengenai hubungan antara derajat kesehatan dengan keempat faktor determinannya.

Gambar 3.14. Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)



Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, dan akses terhadap air bersih, dan jenis lantai terluas. Berdasarkan data Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 99,37 persen rumah tangga di Kota Tangerang yang sudah memiliki tempat buang air besar. Dengan kata lain masih ada 0,63 persen rumah tangga di Kota Tangerang yang tidak memiliki tempat buang air besar. Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat



kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2015 di Kota Tangerang sebanyak 96,45 persen rumah tangga sudah menggunakan kloset leher angsa. Walaupun demikian hanya sekitar 64,80 persen rumah tangga saja yang menggunakan kloset leher angsa dengan dilengkapi tempat pembuangan akhir tangki septik. Dengan kata lain masih ada sebanyak 35,20 persen rumah tangga di Kota Tangerang yang belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak.

Tabel 3.20. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Tempat Buang Air Besar, Sumber Air Minum Utama, , dan Jenis Lantai Terluas di Kota Tangerang Tahun 2015

Indikator	2015
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Tempat Buang Air Besar:	
Ø Leher Angsa	96,45
Ø Plengsengan dengan tutup dan tanpa tutup	2,42
Ø Cemplung/Cubluk	0,5
Ø Tidak Pakai	0,63
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama:	
Ø Air Kemasan Bermerk	41,07
Ø Air Isi Ulang	30,18
Ø Ledeng Meteran dan Eceran	7,56
Ø Sumur Terlindung dan Tak Terlindung	21,19
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas:	
Ø Keramik	84,18
Ø Marmer/Granit	1,77
Ø Ubin/Tegel/Teraso	4,63
Ø Kayu/Papan Kualitas Tinggi	0,5



Indikator	2015
Ø Semen/Bata Merah	7,72
Ø Tanah	1,04
Ø Lainnya	0,16

Sementara itu akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Sumber air minum layak adalah air yang digunakan untuk minum/mandi/cuci yang meliputi air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerk dan air isi ulang dikategorikan sebagai tidak ada akses terhadap air minum layak. Pada tahun 2015 di Kota Tangerang ada sebanyak 71,25 persen rumah tangga tidak ada akses terhadap air bersih, 20,79 persen rumah Tangga memiliki akses terhadap air minum layak dan masih terdapat 7,96 persen rumah tangga tidak memiliki air minum yang layak. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga memberikan fasilitas air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Selain beberapa indikator lingkungan diatas, jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari keramik, marmer, ubin, kayu atau semen, bukan dari tanah,



karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2015 sudah 98,80 persen rumah tangga di Kota Tangerang memiliki lantai rumah terluas dengan kriteria baik. Namun demikian yang perlu diperhatikan pemerintah Kota Tangerang adalah masih terdapat sekitar 1,20 persen rumah tangga yang jenis lantai terluasnya adalah tanah/lainnya.

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk lainnya adalah pelayanan kesehatan. Indikator yang dapat mengukur pelayanan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sampai dengan tahun 2015 di Kota Tangerang telah tersedia 28 unit rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, 72 unit puskesmas dan puskesmas pembantu, serta 1.075 unit posyandu.

Salah satu indikator dalam upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan bayi adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Hal ini diupayakan dalam rangka kesehatan reproduksi agar persalinan yang telah dilakukan oleh tenaga medis lebih aman dibandingkan oleh selain tenaga medis. Praktek persalinan yang aman menjadi salah satu faktor penentu keselamatan ibu dan bayi hingga pada akhirnya akan menurunkan resiko kematian keduanya.

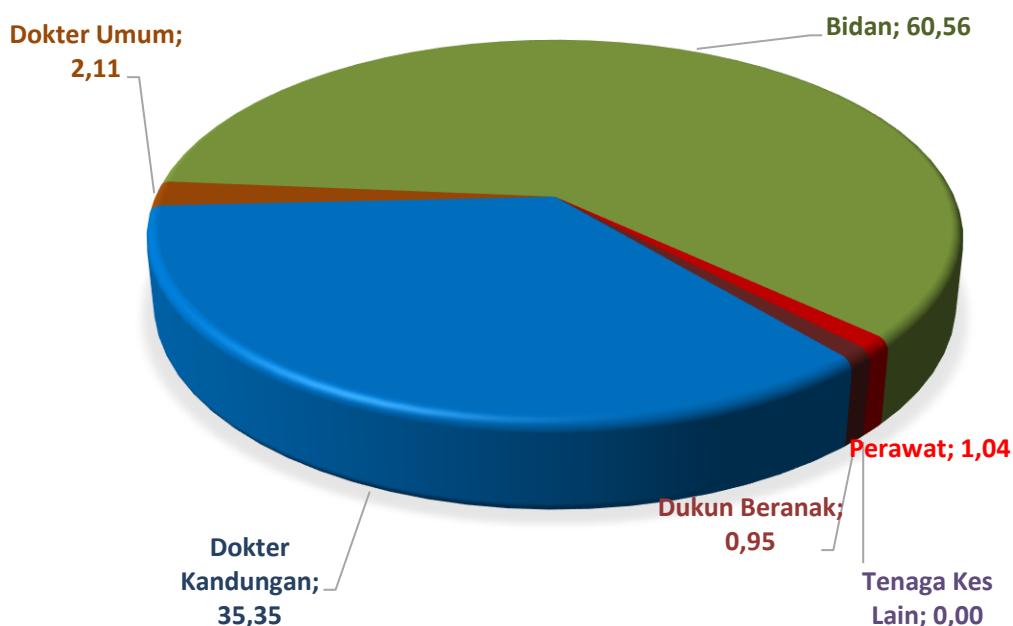


Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan salah satu penunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2014, rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Tangerang sebesar 0,48. Dengan estimasi jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar 2.047.105 dan jumlah puskesmas sebanyak 33, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 62.033 penduduk. Sementara rasio dokter umum di Kota Tangerang 14,4 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter umum yang disarankan adalah 40 per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi di Kota Tangerang yaitu 4,2 per 100.000 penduduk. Target kebutuhan tenaga kesehatan yang dianjurkan untuk rasio dokter gigi adalah 12 per 100.000 penduduk. Rasio perawat per 100.000 penduduk di Kota Tangerang adalah 74,7 per 100.000 penduduk. Dengan target yang dianjurkan untuk rasio perawat adalah 158 per 100.000 penduduk. Rasio bidan per 100.000 penduduk di Kota Tangerang adalah 22,9 per 100.000 penduduk. Dengan target yang dianjurkan untuk rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tangerang secara umum belum memenuhi target. Hal ini menjadi salah satu program yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan



pendistribusian tenaga kesehatan yang memadai di setiap wilayah yang masih kekurangan tenaga medis.

Gambar 3.15. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran yang Terakhir di Kota Tangerang Tahun 2015



Pada tahun 2015 di Kota Tangerang sudah 95,91 persen wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga medis, dalam hal ini dengan bantuan dokter kandungan dan bidan. Selain itu ada juga wanita usia 15-49 tahun pernah kawin yang melakukan persalinan dengan bantuan dokter umum, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat 0,95 persen persalinan yang dilakukan bukan dengan tenaga medis, melainkan dengan dukun beranak.



Untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat berkelanjutan mulai dari bayi belum lahir (intervensi kepada ibu hamil) sampai dengan kelompok lanjut usia, antara lain:

- a) perencanaan kehamilan pada pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b) pola makan dan pola hidup sehat bagi seluruh kelompok usia melalui pelayanan gizi,
- c) pelayanan kesehatan penyakit tidak menular melalui pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis), serta
- d) pelayanan kesehatan para kelompok usia lanjut di Puskesmas, Posbindu, maupun kegiatan homecare.

Gambar 3.16. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang





3.3.9 **SASARAN 9**

Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,70	3,90	105,41	3,97	98,24
Persentase penduduk miskin	%	4,91	5,04	5,04	5,04	100,00	4,55	89,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						102,70		89,22

Rata-rata capaian kinerja sasaran 9 Tahun 2016 melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 102,70%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**, masih menyisakan 11,78% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2018.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.9.1 **Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tangerang berfluktuatif, Tahun 2013 berjumlah 65.262 orang, tahun 2014 meningkat menjadi 68.586 orang, kemudian tahun 2015 berkurang menjadi 68.577 orang.



Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target tahun 2016 sebesar 3,55% dan tercapai realisasi sebesar 3,90% meskipun secara persentase terlihat adanya peningkatan namun dapat dijelaskan secara absolut terjadi penurunan jumlah PMKS, yaitu dari target sebesar 63.754 orang realisasi sebanyak 62.531 orang. Kenaikan persentase tersebut disebabkan adanya pengurangan jumlah penduduk Kota Tangerang sebanyak 192.670 jiwa (sumber Disdukcapil, 2016). Pengurangan jumlah PMKS ini, karena upaya penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Tangerang cenderung berhasil, yang didukung dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

Adapun yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Permendes RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, jenis PMKS ada 26 jenis sebagai berikut :



1. Anak Balita Terlantar, yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksplorasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak Terlantar, yaitu seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, yaitu anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
4. Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,



meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

5. Anak jalanan, yaitu anak yang rentan bekerja di jalan, anak yang bekerja di jalan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
6. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik dan mental.
7. Anak yang Menjadi Korban Kekerasan, yaitu anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.



8. Lanjut Usia Terlantar, yaitu seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Gelandangan, yaitu orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
10. Pengemis, yaitu orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
11. Pemulung, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.



13. Korban Penyalahgunaan Napza, yaitu seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
14. Tuna Susila, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yaitu seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
16. Kelompok Minoritas, yaitu kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
17. Fakir Miskin, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.



18. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yaitu seseorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
19. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi, yaitu keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
20. Korban Tindak Kekerasan, yaitu orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksplorasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Pekerja Migran Bermasalah Sosial, yaitu pekerja migran internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (factor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.



22. Korban Trafficking, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
23. Korban Bencana Alam, orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
24. Korban Bencana Sosial, yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
25. Penyandang Disabilitas, yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
26. Komunitas Adat Terpencil, yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi maupun politik.



Keberadaan PMKS di Kota Tangerang tersebar di 13 kecamatan dan 104 kelurahan, kecuali Komunitas Adat Terpencil yang memang tidak ada di wilayah Kota Tangerang, sehingga jenis PMKS yang ada di Kota Tangerang sebanyak 25 jenis PMKS.

Tabel 3.22. Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tangerang

NO	KECAMATAN	2013	2014	2015	2016
1	BATUCEPER	3.803	3.896	4.035	3.541
2	BENDA	5.609	5.128	5.836	5.353
3	CIBODAS	3.656	3.679	3.865	3.319
4	CILEDUG	3.956	4.118	4.175	3.676
5	CIPONDOH	4.407	4.476	4.571	4.023
6	JATIUWUNG	4.090	4.368	4.343	3.798
7	KARANG TENGAH	3.505	3.702	3.750	3.301
8	KARAWACI	7.202	8.243	7.482	7.185
9	LARANGAN	3.559	3.772	3.777	3.230
10	NEGLASARI	9.326	10.279	9.674	9.441
11	PERIUK	5.023	4.986	5.295	4.793
12	PINANG	5.980	6.526	6.391	5.971
13	TANGERANG	5.146	5.413	5.383	4.900
TOTAL		65.262	68.586	68.577	62.531

Sumber: KTDA dan Dinas Sosial, 2016

Permasalahan

- a) Petugas pemutakhiran data PMKS dan PSKS tidak semuanya memahami dengan baik jenis PMKS dan PSKS yang akan didata.
- b) Terdapat beberapa jenis PMKS yang karena kondisinya cenderung tertutup sehingga sulit untuk didata, seperti jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Tuna Susila.



Solusi

- a) Dilakukan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS bagi petugas pendata tingkat kelurahan dan kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan sasaran Kab/Kota se-Provinsi Banten.

3.3.9.2 Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat



pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka. Mungkin karena alasan itulah mengapa setiap agama menekankan pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan dan juga merupakan salah satu alasan mengapa bantuan internasional untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis. Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).



Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Banten yaitu sebesar Rp421.554 pada tahun 2014 dan Rp455.228 pada tahun 2015 atau naik sebesar 7,99 persen.

Gambar 3.17. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang 2011-2015



Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan dan bukan makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan dan transportasi, yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2011 kontribusi makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi yaitu sebesar 29,13 persen. Pada tahun 2013 garis kemiskinan berasal dari makanan menyumbang sebesar 68,92% dan non makanan 31,15%; dari makanan ternyata kontribusi beras masih tetap tinggi yaitu sebesar 21,75% disusul rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan dan daging ayam ras. Daerah perkotaan seperti Kota Tangerang pengeluaran



yang paling dominan dikeluarkan oleh penduduk miskin berupa non makanan adalah perumahan, listrik, pendidikan dan angkutan.

Pola Konsumsi makanan penduduk miskin menunjukkan perbedaan pola konsumsi masyarakat Kota Tangerang pada umumnya dan penduduk miskin di Kota Tangerang, dimana 23,11 persen konsumsi nya untuk padi-padian yaitu beras dan sebagian kecil terigu sedangkan rata-rata penduduk hanya membelanjakan 9,68 persen konsumsi makanannya untuk padi-padian.

Tabel 3.23. Persentase Pola Konsumsi Penduduk Miskin dan Rata-rata Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Konsumsi Makanan Tahun 2015

Kelompok Konsumsi Makanan	Persentase Pola Konsumsi Penduduk Miskin (Persen)	Persentase Pola Konsumsi Penduduk Kota Tangerang (Persen)
A. Padi-Padian	23,11	9,68
B. Umbi-Umbian	0,61	0,70
C. Ikan/Udang/Cumi/Kerang	8,76	6,19
D. Daging	3,88	6,46
E. Telur Dan Susu	4,25	7,99
F. Sayur-Sayuran	8,92	5,49
G. Kacang-Kacangan	4,16	2,04
H. Buah-Buahan	3,86	5,20
I. Minyak Dan Kelapa	4,95	2,13
J. Bahan Minuman	3,71	2,42
K. Bumbu-Bumbuan	2,17	1,42
L. Konsumsi Lainnya	2,39	2,25
M. Makanan Dan Minuman Jadi	22,59	37,29
N. Rokok	6,64	10,75
Total	100,00	100,00

Konsumsi tertinggi kedua adalah makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 22,59 persen. Seperti kebiasaan masyarakat tangerang pada umumnya yang mengkonsumsi makanan jadi 37,29 persen dari seluruh konsumsi makanan,



kebiasaan membeli makanan jadi juga dilakukan oleh penduduk miskin Kota Tangerang terutama makanan gorengan, roti manis, es dan jajanan anak-anak lainnya, konsumsi air kemasan menyumbang persentase yang lumayan tinggi untuk makanan dan minuman jadi. Air Kemasan ini adalah air galon yang digunakan sebagai sumber air minum utama bagi penduduk miskin hal ini mungkin tidak ada alternatif tersedianya air bersih yang lain sehingga terpaksa membeli air kemasan baik itu air galon maupun air isi ulang.

Urutan tertinggi ketiga adalah sayur-sayuran menghabiskan 8,92 persen dari seluruh konsumsi makanan dan pengeluaran ini sebagian besar untuk membeli bawang baik bawang merah maupun bawang putih, jenis sayuran yang sering dikonsumsi penduduk miskin adalah bayam, kangkung, dan sayur kemas seperti sayur asem, sayur lodeh dan sayur sop. Sedangkan rata-rata penduduk Kota Tangerang mengkonsumsi sayuran sebesar 6,19 persen dari total nilai konsumsi makanan.

Urutan tertinggi keempat adalah konsumsi pada kelompok Ikan/cumi /udang /kerang dengan nilai konsumsi sebesar 8,76 persen dari total nilai konsumsi makanan, jenis ikan yang dikonsumsi sebagian besar penduduk miskin adalah ikan diawetkan atau ikan asin. Urutan berikutnya adalah rokok baik rokok kretek maupun rokok filter nilai konsumsinya mencapai 6,64 persen dari total konsumsi makanan.



Untuk memperoleh sumber protein penduduk miskin Kota Tangerang mengkonsumsi jenis protein berasal dari kacang-kacangan berupa tahu dan tempe yang konsumsinya relatif tinggi, telur dan susu dikonsumsi sebesar 4,25 persen dari total nilai konsumsi sedangkan daging ayam 3,88 persen. Kalau dibandingkan dengan nilai konsumsi rata-rata penduduk Kota Tangerang kelompok daging dan telur jauh dibawah rata-rata konsumsi penduduk Kota Tangerang.

Tabel 3.24. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2011-2015

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
2011	377.062	438.666	815.728
2012	367.189	383.759	750.948
2013	497.673	636.888	1.134.561
2014	545.683	767.712	1.313.395
2015	588.960	765.752	1.354.712

Tabel 3.24 menunjukkan Rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar Rp 1.354.712. Apabila dibandingkan dengan garis Kemiskinan Kota Tangerang yang besarnya Rp 455.228 maka pengeluaran penduduk miskin kota tangerang besarnya hanya sepertiga dari pengeluaran rata-rata penduduk Kota Tangerang. Komposisi pengeluaran untuk makanan sebesar 43,47 persen jauh lebih kecil jika dibandingkan pengeluaran non makanan sebesar 56,52 persen. Data ini menunjukkan kebalikan dari



pengeluaran pola konsumsi penduduk miskin dimana persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding non makanan.

Dengan mengetahui besarnya perkiraan batas garis kemiskinan, selanjutnya dapat dihitung jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tangerang.

Tabel 3.25. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
2011	337.543	114,33	6,14
2012	365.205	106,50	5,56
2013	398.513	103,10	5,26
2014	421.554	98,80	4,91
2015	455.228	102,56	5,04

Sumber: BPS Kota Tangerang

Tabel 3.25 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dimana selalu terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2014 dan naik kembali di tahun 2015. Kenaikan persentase penduduk miskin ini terjadi di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten bahkan di sebagian besar Provinsi di Indonesia. Kebijakan penghematan belanja pemerintah diawal tahun 2015 termasuk harga BBM yang dilepas ke biaya keekonomian ikut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang dalam pengentasan kemiskinan. Program kesehatan gratis, pendidikan melalui



Program Tangerang Cerdas, infrastruktur dan subsidi pangan relatif tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin.

3.3.10 **SASARAN 10**

Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,84	7,00	110,71	7,52	106,91

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator

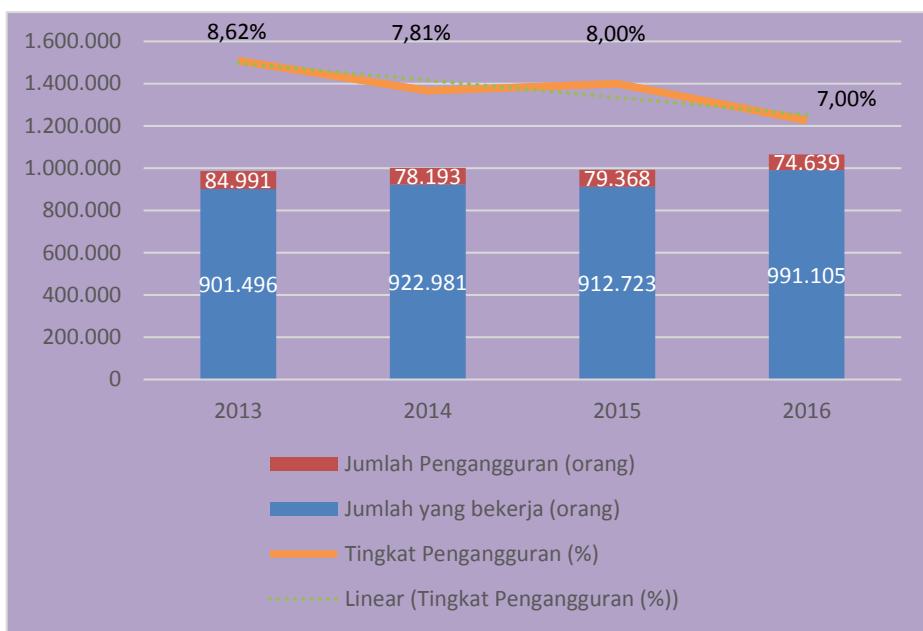


ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 74.639 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.065.744 orang. Sehingga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang tahun 2016 sebesar 7,00%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung menurun.



Gambar 3.18. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2013-2016



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2016

Permasalahan

- Pengangguran Terbuka disebabkan banyaknya Angkatan Kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.
- Angkatan Kerja tidak langsung mulai bekerja atau masih mencari pekerjaan yang sesuai.

Solusi

- Memberikan sekolah gratis (beasiswa) kepada lulusan SMP untuk dapat melanjutkan ke SMA/SMK. Selanjutnya lulusan SMA/SMK untuk dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sehingga lulusan tersebut tidak termasuk dalam Angkatan Kerja yang menganggur.



- b) Memberikan lebih banyak akses peningkatan kesempatan kerja dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui pameran kesempatan kerja (bursa kerja)
- c) Memberikan pelatihan praktis kepada pencari kerja agar dapat meningkatkan keterampilan untuk menjadi wirausaha baru

3.3.11 **SASARAN 11**

Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)

Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidak SARA. Tindakan ini mengebiri dan



melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam Tiga Kategori :

Kategori pertama yaitu **Individual**: merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.

Kategori kedua yaitu **Institusional** : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

Kategori ke tiga yaitu **Kultural** : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Dalam pengertian lain SARA dapat di sebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari



tindakan diskriminasi Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Meningkatnya konflik yang bernuasa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yaitu suatu kekerasan yang dilatarbelakangi sentimental antar suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Konflik SARA biasanya karena adanya egoisitas seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Konflik tersebut bisa disebabkan hanya karena hal sepele, seperti tersinggung, diledek atau hal-hal yang sekiranya tidak perlu dibesar-besarkan. Bukan hanya fisik yang terkena dampaknya, psikispun terganggu. Pasca konflik tersebut seseorang mungkin saja trauma akibat perlakuan yang tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak mau mengalaminya lagi. Sedangkan primordialisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih tinggi dan lebih hebat dari kelompok lain. Primordialisme tertuju kepada pemikiran suatu kelompok terhadap kelompok lain. Paham tersebut mengakibatkan anggota-anggotanya lebih menghormati kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain.



Tabel 3.28. Kejadian dan Penanganan Konflik di Kota Tangerang Tahun 2016

No.	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	PENANGANAN KONFLIK	%
1	Januari	10	10	100,00
2	Februari	8	8	100,00
3	Maret	10	10	100,00
4	April	11	11	100,00
5	Mei	9	9	100,00
6	Juni	3	3	100,00
7	Juli	9	9	100,00
8	Agustus	16	16	100,00
9	September	11	11	100,00
10	Oktober	14	14	100,00
11	November	13	13	100,00
12	Desember	12	12	100,00
JUMLAH		126	126	100,00

Penyelesaian konflik SARA di Kota Tangerang dapat dicapai 100,00 %, Upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang melalui berbagai program yaitu :

- 1) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kejahatan
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dan
- 4) Program Pemberantasan Penyakit masyarakat.

Permasalahan

- a) Organisasi Kemasyarakatan yang sering terjadi bentrokan antar Ormas.
- b) Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Penyalahgunaan Rumah/Toko dijadikan Tempat Ibadah yang belum mempunyai Ijin Sementara dari Walikota Tangerang)



- c) Lunturnya Rasa Kebangsaan dan Rasa Solidaritas di kalangan Masyarakat.
- d) Terjadinya Bentrok antar Kelompok Masyarakat yang mengatasnamakan Suku

Upaya yang dilakukan dalam:

A. Bentrokan antar Ormas

- a) Melakukan Kegiatan Jambore Ormas yang melibatkan 16 Ormas yang berbasis massa di wilayah Kota Tangerang dengan Jumlah peserta 400 Orang sekaligus pernyataan sumpah darah dari pengurus Ormas agar tidak terjadi pertikaian di kemudian hari.
- b) Melakukan Kegiatan Kemitraan bagi 10 Ormas dengan pembinaan bagi per anggota sebanyak 100 Orang per ormas
- c) Melakukan Kegiatan Fasilitasi pertemuan dan kerjasama antar Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM serta Partai Politik sebanyak 400 Orang.
- d) Melakukan Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas dan LSM dengan peserta 130 orang.
- e) Melaksanakan pertemuan antar pengurus ormas yang bertikai dengan unsur Polres agar dikemudian hari jika terjadi pertikaian maka pengurus Ormas bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum maupun moril



- f) Memberikan rekomendasi terhadap perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan anggota Ormas baik sebagai Staff ataupun tenaga keamanan (sesuai kompetensi masing-masing).

B. Konflik Pendirian Rumah Ibadah

- a) Pembahasan Forum Kerukunan Umat Beragama agar Konflik Pendirian Rumah Ibadah dapat segera ditangani dengan baik.
- b) Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bersama dengan FKUB Kota Tangerang dan FKUB Provinsi Banten terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Tangerang.
- c) Melaksanakan Kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan.
- d) Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penangan Konflik (IPOLEKSOSBUDHANKAM-Agama).
- e) Melakukan Kegiatan Pendataan Rumah Ibadah.
- f) Melakukan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g) Melakukan Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama.



C. Lunturnya Rasa Kebangsaan dan Rasa Solidaritas

- a) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
- b) Melaksanakan Kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- c) Memberikan Pembekalan sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila.
- d) Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Bela Negara bagi Apartur dan Kalangan Masyarakat.
- e) Meningkatkan Nilai-nilai Kebangsaan dalam Aspek Pergaulan dikalangan Remaja.
- f) Menangkal Paham dan sifat keacuhan akan rasa solidaritas yang menjadi penyebab lunturnya kebudayaan kebangsaan yang terkenal dengan sifat bergotong royong.

D. Bentrok antar Kelompok Masyarakat

- a) Mempertemukan terhadap Pimpinan Kelompok yang mengatasnamakan suku tertentu yang terjadi bentrok untuk dilaksanakan pembinaan di Kantor Kesbangpol Kota Tangerang.
- b) Memberdayakan Forum Pembauran Kebangsaan dengan memberikan Hibah keuangan dari Walikota Tangerang yang digunakan untuk



melaksanakan pembinaan bagi para anggota kelompok/suku-suku yang ada Dikota Tangerang.

- c) Melaksanakan Deklarasi Antar Suku Untuk Menciptakan Kota Tangerang aman,damai dan sejahtera.

3.3.12 **SASARAN 12**

Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan

Pencapaian sasaran 12 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Luas genangan dan Banjir	Ha	247	245	240	240	100,00	225	93,33

Kinerja sasaran terwujudnya pengendalian banjir dan genangan dicapai melalui satu indikator yaitu luas banjir dan genangan dengan target tahun 2016 sebesar 240 Ha dan dapat di realisasikan sebesar 240 Ha atau 100% dari Target. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan luas genangan seluas 5 Ha dari Tahun sebelumnya (tahun 2015) yaitu seluas 245 Ha dan apabila diidentifikasi dalam jumlah titik terdapat pengurangan titik dari 13 titik (tahun 2015) menjadi 10 titik (tahun 2016). Adapun 3 titik pengurangan luasan



banjir dan genangan pada tahun 2016 diantaranya di kelurahan Pedurenan,

Kelurahan Periuk Jaya dan Taman elang.

Tabel 3.30. Lokasi dan pengurangan lokasi banjir

No.	Kecamatan	Tinggi Genangan / Banjir	Lokasi Genangan / Banjir Tahun 2015	Lokasi Genangan /Banjir Tahun 2016
1	Benda	20-50 cm	Kel. Benda	Kel. Benda
2	Cibodas	20-50 cm	Kel. Panungangan Barat	Kel. Panungangan Barat
3	Karang Tengah	60-75 cm	Kelurahan Pedurenan, Kel.Karang Timur	Kel.Karang Timur
4	Karawaci	160 cm	Pondok Arum	Pondok Arum
5	Cipondoh	100-150 cm	Kel. Petir	Kel. Petir
6	Ciledug	70-100 cm	Puri Kartika, Wisma Tajur	Puri Kartika, Wisma Tajur
7	Pinang	60-80 cm	Pinang Griya	Pinang Griya
9	Periuk	40-200 cm	Total Persada, Periuk Jaya, Periuk Damai, Taman Elang	Total Persada, Periuk Damai
Jumlah Titik Banjir			13 titik	10 Titik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 2016

Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengatasi luasan genangan dan banjir dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong Sebanyak 484 ruas saluran dengan panjang 90.941 m dengan alokasi anggaran Rp126.273.491.000,00.
- 2) Pemeliharaan saluran drainase sepanjang 175.378 m dan pengadaan u-ditch berbagai ukuran sebagai persediaan / antisipasi bila ada keperluan penanganan genangan dengan alokasi anggaran Rp7.957.586.900,00.



- 3) Pembangunan turap sepanjang 2500 m dengan alokasi anggaran Rp13.128.022.000,00 melalui pembangunan turap penahan dinding sungai untuk mencegah luapan air sungai atau kali.
- 4) Pelaksanaan normalisasi sungai sebanyak 23 lokasi dengan volume 44.174 m³ dengan alokasi anggaran Rp9.625.654.000,00 melalui kegiatan pengerukan sungai secara mekanis atau menggunakan alat berat untuk meningkatkan kapasitas / daya tampung sungai.
- 5) Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air sebanyak 48 unit rumah pompa dan 8 unit pompa berjalan dengan alokasi anggaran Rp1.621.598.000,00 melalui pemeliharaan pompa-pompa banjir sebagai sarana penanggulangan banjir.
- 6) Pembangunan pintu air sebanyak 3 unit dengan alokasi anggaran Rp744.942.000,00 melalui pembangunan pintu air sebagai sarana untuk pengaturan aliran air untuk pembuangan, penyadap dan pengatur lalu lintas air sehingga mencegah adanya luapan air.
- 7) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 1 unit embung dengan alokasi anggaran Rp936.969.900,00 melalui pembangunan embung sebagai daerah / bangunan tampungan air dalam rangka pengendalian banjir dan genangan.



- 8) Pembangunan Sumur Resapan sebanyak 145 sumur resapan dengan alokasi anggaran Rp658.202.000,00 melalui pembangunan sumur resapan dan lubang biopori sebagai daerah resapan air untuk mengurangi genangan.
- 9) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai sebanyak 15 lokasi dengan alokasi anggaran Rp4.314.962.410,00 melalui rehab turap atau dinding penahan air pada sungai.
- 10) Pembangunan pusat – pusat pengendalian banjir sebanyak 14 bangunan system pengendali banjir dengan alokasi anggaran Rp7.683.239.000,00 melalui pembangunan system pengendali banjir berupa romah pompa dan ssstem resapan.
- 11) Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali sepanjang 36.000 m dengan alokasi anggaran Rp12.060.632.770,00 melalui pengerukan dan pembersihan kali secara manual.

Permasalahan / Hambatan yang dihadapi

- a) Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan / alih fumgsi lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan, yang semula merupakan daerah resapan air menjadi bangunan, perumahan, industri/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai



tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuang;

- b) Penyempitan dan tidak memadainya kapasitas / daya tampung sungai/saluran pembuang yang diakibatkan pendangkalan, sedimentasi ataupun pemanfaatan bantaran sungai oleh bangunan liar, sehingga kapasitas daya tampung sungai semakin berkurang.
- c) Curah hujan yang tinggi diatas curah hujan rencana (design)
- d) Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan;
- e) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi dengan optimal.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Upaya dalam menangani permasalahan / hambatan yang dihadapi dalam pencapaian mengurangi luas genangan dan banjir;
- b) Perlunya penyempurnaan dan penegakkan peraturan mengenai persyaratan atas perubahan fungsi lahan yang semula merupakan daerah penampung/resapan, antara lain dengan mensyaratkan diadakannya



analisa mengenai dampak lingkungan beserta fasilitas drainase yang memadai sebagai pengganti fungsi lahan semula;

- c) Perlu digalakkannya sosialisasi, penerapan dan penegakkan aturan, baik itu Perda, Keppres ataupun UU yang berkaitan dengan pemanfaatan bantaran sungai/jaringan irigasi;
- d) Pelaksanaan normalisasi dan pengerukan lumpur dalam rangka memanfaatkan saluran pembuangan dan jaringan irigasi yang ada secara optimal;
- e) Pembangunan pusat – pusat pengendalian banjir melalui sistem tata air mandiri dan bangunan tampungan dan resapan air.
- f) Pelaksanaan manajemen tata air seperti pengeringan dan penggelontoran sungai / saluran dan situ / embung.
- g) Pompanisasi.
- h) Untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi, perlu dilakukan pembuatan, perbaikan, dan peninggian tanggul yang dikombinasikan dengan perbaikan sistem drainase dan pengadaan pompa air, terutama pada lokasi yang rendah dan di tepi sungai.

3.3.13 **SASARAN 13**

Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu



Pencapaian sasaran 13 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Sasaran 13

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase kemacetan yang tertangani	%	73,00	75,00	79,00	89,00	89,00	100,00	100,00

Meningkatnya Populasi penduduk ataupun Pertumbuhan Ekonomi saat ini berdampak pada pertumbuhan yang sangat cepat dibidang Automotif, hal ini jelas sangat membawa dampak kepada kepadatan kendaraan di jalan raya, hal ini pula yang membawa Kota Tangerang dalam masa perkembangannya menjadi Kota yang sangat memiliki potensial untuk segala macam pertumbuhan, termasuk Kemacetan, kami Dinas Perhubungan Kota Tangerang telah mencatat pada Tahun 2013 ada sekitar 82 Titik Kemacetan yang tumbuh di Kota Tangerang dan itu menjadi salah satu target utama Dinas Perhubungan Kota Tangerang dalam program-programnya. Pada tahun 2013 untuk tahap awal Dinas Perhubungan telah melakukan inventarisir Titik-titik Kemacetan di Kota Tangerang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Tangerang (2014 – 2018) sebanyak 82 Titik Kemacetan sebagaimana berikut :

A. Kecamatan Jatiuwung

- Simpang Manis
- Simpang Pajajaran



- Simpang Telesonic
- Simpang Prabu Siliwangi
- Simpang Gajah Tunggal
- Simpang Kel. Keroncong

B. Kecamatan Periuk

- Simpang Cadas
- Simpang KM
- Simpang Nagrak
- Simpang Grand Tomang
- Simpang Cangkring
- Simpang Sangiang
- Kelurahan Periuk
- Simpang Vila Tangerang Rgncy

C. Kecamatan Cibodas

- Simpang Pinangsia
- Simpang Ps. Malabar
- Simpang Kavling Pemda
- Rumah Sakit Annisa

D. Kecamatan Karawaci

- Simp. M. Toha – Aria Wangsakara



- Simpang Gd. Cisadane
- Simpang Galeong
- Jembatan Satria
- Simpang Benoa
- Simpang Pintu Air 10
- Panarub
- Simpang Gerendeng
- Simpang M. Toha – Otista
- Simpang Kenaiban
- Simpang Aria Santika – Galeong – Subandi
- Simpang Cimone
- Simpang Sasmita
- Simpang Teuku Umar – Imam Bonjol
- Simpang Tanah Gocap
- Simpang Beringin – Proklamasi – Teuku Umar

E. Kecamatan Neglasari

- Simpang 3 Sewan
- Simpang Suryadharma – Pembangunan 3
- Simpang 7
- Simpang M1



F. Kecamatan Tangerang

- Simpang Tanah Tinggi
- Simpang Windu Karya
- Jembatan Gerendeng
- Depan Tangerang City
- Simpang waru
- Simpang Benteng Betawi
- Depan Yuppentek

G. Kecamatan Benda

- Simpang Al Amin
- Simpang Duta Garden
- Simpang Rawa Bokor
- Simpang Jawa Pos

H. Kecamatan Batuceper

- Simpang Garuda – Halim Perdanakusumah
- U Turn Kawasan Niaga
- Simpang Kelurahan Batusari
- Simpang Ampera
- U Turn Bir Bintang
- Simpang Maulana – Benteng Betawi



I. Kecamatan Cipondoh

- Simpang Banjar Wijaya
- Simpang Gondrong
- Simpang Taman Royal 1 & 3
- Simpang Pondok Bahar
- Situ Cipondoh

J. Kecamatan Pinang

- Kebon Nanas
- Simpang Pikun
- Segmen FM3 – Tifico
- Simpang Pasar Bengkok
- Simpang Alam Sutra
- Graha Raya
- Simpang Modernland

K. Kecamatan Karang Tengah

- Akses Ciledug Indah 2
- Simpang Joglo
- Simpang Bangun Reksa
- Akses Perum Barata
- CBD Ciledug



L. Kecamatan Ciledug

- Simpang Ciledug
- Simpang Parung Serab
- Simpang H. Mencong
- Simpang Jl. Gunung Jati
- Simpang Rd. Fatah – H. Mencong

M. Kecamatan Larangan

- Simpang Cipadu
- Simpang Swadaya
- Simpang Chairil Awar
- Simpang Inpres (Puri Beta)
- Simpang Prof. Hamka

Tabel 3.32. Prosentase Kemacetan Yang Tertangani

No.	Tahun	Target Penanganan Kemacetan	Realisasi Kemacetan Yang Tertangani	Prosentase Pencapaian Taget / Tahun	Prosentase Pencapaian Taget RPJMD
1	2013	55	55	100%	67,07%
2	2014	60	60	100%	73,17%
3	2015	65	65	100%	79,27%
4	2016	73	73	100%	89,02%
5	2017 s.d 2018	82	82		

Pada Tahun 2016 ini, Dinas Perhubungan Kota Tangerang telah dapat menangani 73 Titik Kemacetan dari 73 Titik Kemacetan yang ditargetkan, dengan penanganan melalui APILL, MRLL dan Petugas (Personil) atau



gabungan antara APILL dan Petugas, sehingga pencapaian kinerja sasaran 30, untuk Indikator sasaran *Persentase Kemacetan Yang Tertangani* pada kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100,00%.

Pencapaian peningkatan Penanganan Titik Kemacetan yang telah ditangani Dinas Perhubungan Kota Tangerang tahun 2016 ini, yaitu sebanyak 8 Titik Kemacetan, dengan penanganan melalui Penambahan Personil dan MRLL, sehingga Titik Kemacetan yang tertangani bertambah dari 65 Titik Kemacetan pada Tahun 2015 menjadi 73 Titik Kemacetan di tahun 2016. Dengan demikian Kinerja Sasaran dapat tercapai dengan adanya jumlah kenaikan dalam hal Penanganan Titik Kemacetan tersebut.

Adapun 8 Titik Kemacetan yang yang tertangani pada Tahun 2016 berada pada :

- 1) Simpang Benteng Betawi
- 2) Simpang Rawa Bokor
- 3) U Turn Bir Bintang
- 4) U Turn Kawasan Niaga
- 5) Simpang Ampera
- 6) Segmen FM3 – Tifico
- 7) Simpang Joglo
- 8) Simpang H. Mencong



Pengendalian Kemacetan pada setiap Titik Kemacetan yang berjumlah 73 Titik Kemacetan tersebut (Simpang ataupun ruas jalan) dilakukan dengan melalui APILL, MRLL dan Petugas (Personil) atau gabungan antara APILL dan Petugas. Adapun Indikator Kinerja '*Persentase kemacetan yang tertangan*' dapat terealisasi melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun 2016 dengan realisasi total sebesar Rp. 7.196.136.240, antara lain :

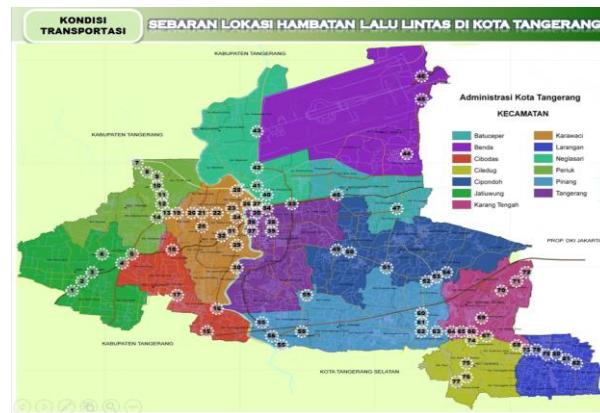
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 1.1 Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, terealisasi anggaran sebesar Rp. 68.449.100
 - 1.2 Kegiatan Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas STA 11 (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015), terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.105.157.390
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LL AJ
 - 2.1 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, terealisasi anggaran sebesar Rp. 552.926.200.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 3.1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.209.754.500



- 3.2 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan, terealisasi anggaran sebesar Rp. 924.032.000
 - 3.3 Kegiatan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terealisasi anggaran sebesar Rp. 115.560.000
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 4.1 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir Umum, terealisasi anggaran sebesar Rp. 129.319.000
 5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 5.1 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan, terealisasi anggaran sebesar Rp. 532.776.250
 - 5.2 Kegiatan Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas, terealisasi anggaran sebesar Rp.605.606.500
 - 5.3 Kegiatan Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan, terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.765.106.300
 - 5.4 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas, terealisasi anggaran sebesar Rp. 187.449.000



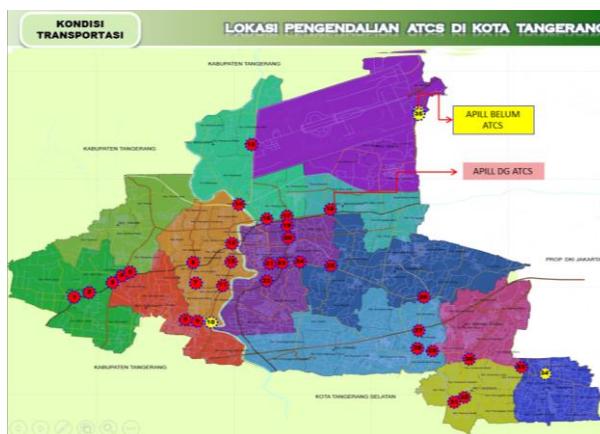
Gambar 3.19. Sebaran Lokasi Hambatan Lalu Lintas



Gambar 3.20. Lokasi Pengaturan Lalu Lintas

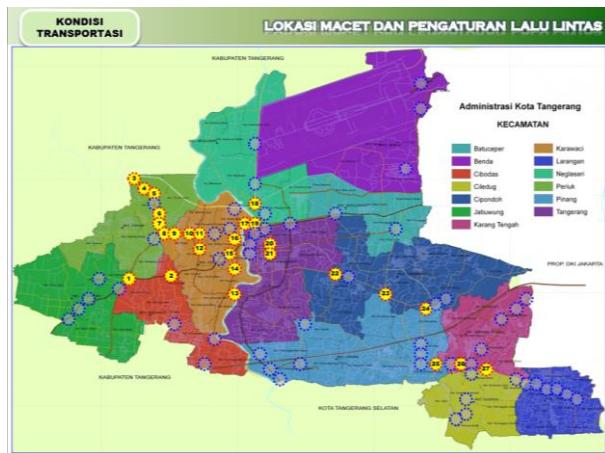


Gambar 3.21. Lokasi Pengendalian ATCS

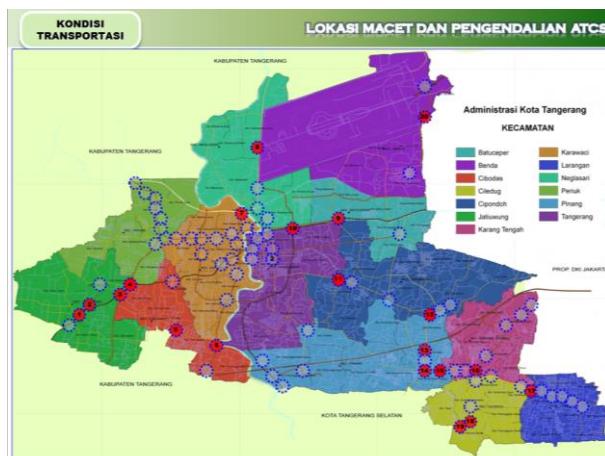




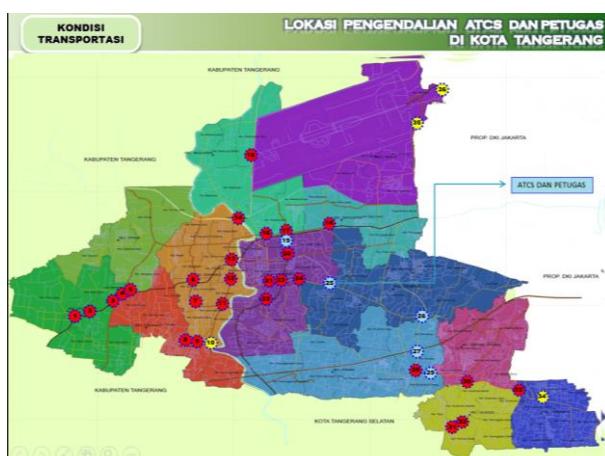
Gambar 3.22. Lokasi Macet dan Pengaturan Lalu Lintas



Gambar 3.23. Lokasi Macet dan Pengendalian ATCS



Gambar 3.24. Lokasi Pengendalian ATCS dan Petugas





Adapun sisa Titik Kemacetan yang belum tertangani dan Rencananya akan ditangani oleh Personil dan MRLL sampai dengan masa akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Simpang Manis, menggunakan Personil
- 2) Simpang M. Toha – Aria Wangsakara, menggunakan Personil
- 3) Simpang Duta Garden, menggunakan MR
- 4) Simpang Jawa Pos, menggunakan Personil
- 5) Simpang Pondok Bahar, menggunakan Personil
- 6) Simpang Arah Alam Sutera, menggunakan Personil
- 7) Simpang Arah Modernland, menggunakan Personil
- 8) Simpang Parung Serab, menggunakan MRLL
- 9) Simpang Jl. Gunung Jati, menggunakan Personil

Permasalahan

- a) Terkait APILL dan ATCS :
 - Adanya Kerusakan-kerusakan pada Traffic Light akibat cuaca ataupun dikarenakan masa usia kemampuan alat atau komponen tersebut.
 - Kurangnya SDM Penanganan Teknis Traffic Light.
 - Kurangnya daya dukung Alat untuk Penyambungan kabel FO.
 - Belum adanya Tenaga Teknis pada Server ATCS
- b) Terkait Petugas / Personil Lapangan :



- Kurang idealnya jumlah Petugas / Personil yang ditempatkan pada setiap Titik Kemacetan.

Upaya yang akan dilakukan

a) Terkait APILL dan ATCS :

- Diperlukan Peningkatan Pemeliharaan / Maintenance ataupun Penggantian pada Traffic Light yang tidak layak kondisinya.
- Adanya Cadangan (Stock) Alat atau Komponen Traffic Light, sehingga dapat mengatasi pergantian dengan segera apabila terjadi kerusakan pada komponen.
- Peningkatan SDM Penanganan Teknis Traffic Light melalui Pelatihan.
- Pengadaan Alat untuk mendukung kinerja para Teknisi Traffic Light.
- Diadakan Pelatihan terhadap Pegawai ATCS untuk dijadikan Tenaga Teknis Server ATCS.

b) Terkait Petugas / Personil Lapangan :

- Idealnya jumlah Petugas pada setiap Titik Kemacetan sebanyak 3 (Tiga) orang Petugas / Personil.
- Apabila dimungkinkan dilakukan penambahan Petugas / Personil untuk di lapangan.
- Alat Kerja / alat dukung Personil dalam melaksanakan tugas di lapangan.



3.3.14 **SASARAN 14**

Terwujudnya Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang
Layak

Pencapaian sasaran 14 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33. Capaian Kinerja Sasaran 14

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,70	98,80	100,10	99,43	99,37

Rumah layak huni dapat dilihat dari aspek kesehatan (sanitasi, sirkulasi udara, pencahayaan), aspek kecukupan luas ruang, maupun kondisi kerusakannya. Penanganan rumah tidak layak huni merupakan prioritas dalam pembangunan perumahan di Kota Tangerang. Pada tahun 2016, Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan 1451 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan pendanaan bersumber dari APBD Kota Tangerang dan Bantuan Keuangan Provinsi Banten dengan total anggaran mencapai Rp 30.584.137.000,-.

Secara teknis pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan sekaligus guna meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat. Masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak huni harus merupakan penduduk Kota Tangerang (ber KTP Kota



Tangerang), tanah milik pribadi, tidak memiliki rumah di tempat lain, serta memiliki penghasilan di bawah upah minimum.

Dengan pembangunan ini, rumah layak huni di Kota Tangerang mencapai 98,80% sesuai dengan target yang ditetapkan (realisasi 100%). Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk terus memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki rumah berkategori tidak layak huni, dengan memperkuat basis data dan melanjutkan pembangunan RTLH.

3.3.15 **SASARAN 15**

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 15 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34. Capaian Kinerja Sasaran 15

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2016			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U, SB, B, C, K, SK, W	W	W	W	W	100,00	K	33,33

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Tangerang ditengah meningkatnya faktor-faktor pengaruh yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak



pertumbuhan ekonomi maupun jumlah penduduk Kota Tangerang yang termasuk dalam kategori kota besar. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk di jawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Indonesia berada dalam kategori baik, sedang atau buruk. Maka, untuk menjadi pedoman dalam menentukan kategori kualitas lingkungan hidup digunakanlah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengukur Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

Tujuan dari IKLH yaitu sebagai informasi bagi pengambil keputusan yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber masalah lingkungan hidup sehingga dapat diambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan lingkungan hidup, dan sebagai bahasa komunikasi yang menjadi penggerak bagi keterlibatan publik untuk ikut aktif menjaga keualitas lingkungan hidup.



IKLH dihitung berdasarkan jumlah nilai dari 3 hasil pengukuran indeks yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%.

Yakni sebagaimana rumus berikut :

$$\text{IKLH} = \frac{(\text{IPA} \times 30\%)}{+} \frac{(\text{IPU} \times 30\%)}{+} \frac{(\text{ITH} \times 40\%)}{}$$

Keterangan :

IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IPA	:	Indeks Pencemaran Air
IPU	:	Indeks Pencemaran Udara
ITH	:	Indeks Tutupan Lahan

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

Indeks Pencemaran Air

Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2016 diukur dengan mengambil air di 9 (sembilan) lokasi sampel yang terdiri dari sungai dan situ : Sungai Cisadane, Sungai Mokevart, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cicarab, Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, dan Sungai Cangkring.



Tabel 3.35. Hasil IPA Sungai Cisadane

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	11	92%	50	45,83
Cemar Sedang	1	8%	30	2,50
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	12	100%		48,33

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.36. Hasil IPA Sungai Mokevart

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	7	88%	50	43,75
Cemar Sedang	1	13%	30	3,75
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	8	100%		47,50

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.37. Hasil IPA Sungai Angke

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	8	100%	50	50,00
Cemar Sedang		0%	30	0,00
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	8	100%		50,00

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016



Tabel 3.38. Hasil IPA Sungai Sabi

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	5	71%	50	35,71
Cemar Sedang	2	29%	30	8,57
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	7	100%		44,29

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.39. Hasil IPA Cirarab

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	7	88%	50	43,75
Cemar Sedang	1	13%	30	3,75
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	8	100%		47,50

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.40. Hasil IPA Situ Cipondoh

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	8	100%	50	50,00
Cemar Sedang		0%	30	0,00
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	8	100%		50,00

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016



Tabel 3.41. Hasil IPA Situ Gede

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	4	80%	50	40,00
Cemar Sedang	1	20%	30	6,00
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	5	100%		46,00

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.42. Hasil IPA Bulakan

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan		0%	50	0,00
Cemar Sedang	5	100%	30	30,00
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	5	100%		30,00

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.43. Hasil IPA Cangkring

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan		0%	50	0,00
Cemar Sedang	5	100%	30	30,00
Cemar Berat		0%	10	0,00
Total	5	100%		30,00

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.44. Hasil Rekap IPA

Lokasi	Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)
Sungai Cisadane	48,33
Sungai Mokervart	47,50
Sungai Angke	50,00



Lokasi	Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)
Sungai Sabi	44,29
Sungai Cirarab	47,50
Situ Cipondoh	50,00
Situ Gede	46,00
Situ Bulakan	30,00
Situ Cangkring	30,00
Rata-rata	43,74

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Dari perhitungan nilai indeks per mutu air terhadap 9 (sembilan) sampel lokasi sebagaimana disajikan pada tabel 1.10 dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencemaran Air (IPA) berada pada nilai rata-rata IPA : 43,74.

Indeks Pencemaran Udara

Indeks Pencemaran Udara diukur dengan menguji sampel udara dibeberapa lokasi untuk memperoleh nilai perbandingan atau rasio nilai pencemaran SO2 dan NO2 terhadap nilai baku mutunya. Hasil perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.45. Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	22,24	40	0,556
SO2	10,65	20	0,5325
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,54425
Indeks Kualitas Udara			75,31944

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Dari perhitungan berdasarkan IPU sebagaimana tabel 1.11 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai kualitas udara Kota Tangerang tahun 2016 ialah 75,31.



Indeks Tutupan Lahan

Tabel 3.46. Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan/Hutan

Tahun	Luas Hutan/ lahan (km ²)	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/ Lahan	ITH
2016	20,50	181,818	11,27501128	32,75783727

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

Indeks Tutupan Lahan (ITH) diukur dengan memperhitungkan luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah Kota Tangerang. Hingga tahun 2016 luas RTH publik telah mencapai 2050,18 Hektar atau 20,50 KM², sehingga jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Tangerang 181,818 KM² maka persentase RTH publik baru mencapai 11,27%. Dengan mengacu pada rumusan baku perhitungan ITH, maka ITH Kota Tangerang berada pada angka 32,75 seperti yang tertera pada Tabel 3.46

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang

Dari perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Lahan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai IKLH Kota Tangerang ialah sebagai berikut:

Tabel 3.47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Pencemaran Air	43,74	30%	13,122
2	Indeks Pencemaran Udara	75,32	30%	22,596
3	Indeks Tutupan Hutan	32,75	40%	13,10
	IKLH Kota Tangerang			48,821

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2016



Berdasarkan diatas, maka Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tahun 2016 sebesar **48,821** dan berada dalam kategori "**Waspada**" (**W**).

Secara umum kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang masih jauh dari ideal karena memang kota Tangerang merupakan salah satu kota metropolitan dengan kultur dan budaya yang beragam, dibutuhkan sinergi dengan masyarakat untuk ikut berperan secara bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan antara lain dengan kegiatan:

- 1) Hari Bebas Kendaraan di 6 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 471.850.000,00 yaitu di Puri Beta I Kecamatan Larangan , Jalan Pinang Kunciran Kecamatan Pinang, Jalan Irigasi Sipon Kecamatan Cipondoh, Jalan M. Yamin Kecamatan Tangerang, Jalan Suryadharma Kecamatan Neglasari dan Perum Kecamatan Cibodas
- 2) Penataan Lingkungan Kampung Hijau dengan anggaran sebesar Rp 328.660.000,00 yang tersebar di 13 Kecamatan berupa bantuan pendampingan pengelolaan dan pemilahan sampah, alat biopori, tempat sampah, tanaman hias dan tanaman produktif



- 3) Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp 26.325.000,00, kegiatan ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bantaran kali/sungai Sabi, menandatangani komitmen "Geber Kali Sabi" untuk menjaga kondisi bantaran dan air sungai terjaga baik
- 4) Peningkatan Penghijauan Kota dengan anggaran sebesar Rp. 333.075.000,00, memberikan bantuan tanaman ke kelurahan, kampung hijau dan sekolah-sekolah sebanyak 1500 tanaman produktif.

Permasalahan yang dihadapi

Masalah yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran yaitu :

- a) Luas RTH publik eksisting masih belum memenuhi luas RTH publik yang seharusnya tersedia yakni baru mencapai 11,27 % belum mencapai 20% dari total luas wilayah Kota Tangerang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang no 26 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b) Rendahnya nilai indeks pencemaran air dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang membuat sampah ke sungai. Kondisi seperti ini masih banyak ditemui di daerah bantaran sungai cirarab wilayah periuk, bantaran sungai sipon di kecamatan Cipondoh
- c) Masih adanya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah di Pasar Induk Tanah Tinggi dan beberapa simpul penumpukan kendaraan



sehingga asap dari kendaraan bermotor tersebut mengurangi kualitas udara di Kota Tangerang sehingga nilain indeks pencemaran udara tidak maksimal.

- d) Masih ada beberapa perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai atau ke dalam tanah seperti PT. CRC yang membuang langsung limbah ke sungai dengan melebihi baku mutu.
- e) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang eco-driving

Upaya yang akan dilakukan

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a) Merestorasi lahan tidur yang dimiliki oleh pemerintah kota dengan tanaman produktif dan peningkatan jumlah kampung hijau dengan anggaran sebesar Rp. 478.187.500,00 sehingga menambah luas tutupan lahan/hutan yang ada.
- b) Pembinaan secara berkelanjutan dan pemberian pemahaman sejak usia dini kepada masyarakat untuk pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 365.939.000,00
- c) Memberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan ijin usaha dan komitmen kerjasama dengan pihak berwajib apabila ditemukan indikasi tindak pidana lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 180.420.000,00.



- d) Membentuk lebih banyak komunitas-komunitas peduli lingkungan, khususnya dengan stakeholder industri-industri yang ada di Kota Tangerang dengan anggaran sebesar Rp. 50.200.000,00
- e) Memberikan sosialisasi tentang eco-driving dan pengendalian pencemaran udara dalam bentuk *fun rally eco- driving* sebagai aplikasi dari hasil sosialisasi dengan anggaran sebesar Rp 287.118.000.

Gambar 3.25. Penyerahan Penghargaan Adipura Kirana tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori kota Metropolitan



Dari hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2016 didapatkan nilai capaian kinerja pada tahun 2016 memperoleh predikat **Sangat Tinggi**, dengan **rata-rata seluruh capaian kinerja dari 15 sasaran adalah 101,86%**.

Pada Tahun 2016, pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan mencakup pencapaian 15 (lima belas) sasaran stratejik. Dari penilaian sendiri (*self assessment*) untuk seluruh indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan



mengacu pada skala ordinal di atas, maka capaian kinerja sasaran dalam Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48. Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

No.	Sasaran	% Rata2 Capaian Kinerja Sasaran	Kriteria
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	110,42	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100,00	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	101,43	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	100,44	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kepariwisataan	102,09	Sangat Tinggi
6	Terwujudnya industri yang maju	99,83	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	100,04	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	100,08	Sangat Tinggi
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	102,70	Sangat Tinggi
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	110,71	Sangat Tinggi
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	100,00	Sangat Tinggi
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	100,00	Sangat Tinggi
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	100,00	Sangat Tinggi
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	100,10	Sangat Tinggi
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Keseluruhan		101,86	Sangat Tinggi

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang, maka penganggarannya



melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dengan total belanja langsung urusan wajib dan pilihan sebesar Rp2.842.223.067.572,68 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp2.311.840.967.083,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 81,34%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016, komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 3.49. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.468.158.464.066,32	1.385.892.633.712,00	37,48
2	Belanja Langsung	2.842.223.067.572,68	2.311.840.967.083,00	62,52
	Jumlah	4.310.381.531.639,00	3.697.733.600.795,00	100,00

Sumber: BPKD, 2016

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung Kota Tangerang memberikan kontribusi sebesar 37,48% dari realisasi belanja di tahun 2016 dan sisanya sebesar 62,52% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Tangerang yang diperjanjikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.384.313.665.696,15 sedangkan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Tangerang tahun 2016 adalah sebesar Rp1.157.989.915.691,00 atau 83,65%, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.50. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	5.467.076.086,00	5.241.383.016,00	95,87
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	9.157.819.416,00	8.579.197.120,00	93,68
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	13.065.587.575,96	12.342.184.660,00	94,46
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1.512.277.518,00	1.284.840.163,00	84,96
5	Meningkatnya kepariwisataan	4.004.931.700,00	3.981.956.160,00	99,43
6	Terwujudnya industri yang maju	1.359.209.000,00	1.297.997.400,00	95,50
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	531.001.499.030,10	479.762.065.107,00	90,35
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	257.218.897.149,09	206.663.547.234,00	80,35
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	28.095.601.610,00	25.400.725.262,00	90,41
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	11.118.730.370,00	7.902.573.300,00	71,07
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	36.031.951.304,00	34.792.188.275,00	96,56
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	341.999.807.627,00	259.291.023.444,00	75,82
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	14.468.180.000,00	10.791.254.665,00	74,59
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	71.323.808.500,00	51.076.688.628,00	71,61
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	58.488.288.810,00	49.582.291.257,00	84,77
	Jumlah	1.384.313.665.696,15	1.157.989.915.691,00	83,65

Sumber: Bappeda dan BPKD sebelum diaudit BPK, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjian Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2016.



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tangerang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.51. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016

No.	Sssaran	Jumlah Indikator	Rata2 Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran	
			Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	110,42	5.241.383.016,00	95,87
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,00	8.579.197.120,00	93,68
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	101,43	12.342.184.660,00	94,46
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	2	100,44	1.284.840.163,00	84,96
5	Meningkatnya kepariwisataan	2	102,09	3.981.956.160,00	99,43
6	Terwujudnya industri yang maju	1	99,83	1.297.997.400,00	95,50
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	100,04	479.762.065.107,00	90,35
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	100,08	206.663.547.234,00	80,35
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	2	102,70	25.400.725.262,00	90,41
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	110,71	7.902.573.300,00	71,07
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	1	100,00	34.792.188.275,00	96,56



No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata2 Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran	
			Realisasi (Rp)	%	
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	100,00	259.291.023.444,00	75,82
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	100,00	10.791.254.665,00	74,59
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	100,10	51.076.688.628,00	71,61
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	100,00	49.582.291.257,00	84,77

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2016 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Tangerang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 15 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100,00% yaitu sebanyak 14 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 3.52. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase Rata2 Capaian Kinerja Sasaran	Presentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	110,42	95,87	14,54
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,00	93,68	6,32
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	101,43	94,46	6,97
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	2	100,44	84,96	15,48
5	Meningkatnya kepariwisataan	2	102,09	99,43	2,66
6	Terwujudnya industri yang maju	1	99,83	95,50	4,33
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	100,04	90,35	9,69
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	100,08	80,35	19,73
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	2	102,70	90,41	12,29
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	110,71	71,07	39,64
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	1	100,00	96,56	3,44
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	100,00	75,82	24,18
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	100,00	74,59	25,41
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	100,10	71,61	28,49
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	100,00	84,77	15,23



3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan amanahnya Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Tangerang telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. Berikut Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2016.

1. Penghargaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Kemandirian Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan terobosan inovatif menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). (10 Februari).
2. Penghargaan Sindo Weekly (13 April).
3. Penghargaan Indonesia Digital Economy Award 2016 (IDEA) dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai upaya perwujudan Kota Cerdas di Kota Tangerang. (11 Mei).
4. Penghargaan Otonomi Daerah Terbaik dari Pemerintah Provinsi Banten. (20 Mei 2016).
5. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2016. Kategori Implementasi Penilaian Kinerja dan BKD Inovatif, (30 Mei 2016).



6. Penghargaan Badan Narkotika Nasional dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (18 Juli 2016).
7. Penghargaan Piala Adipura Kirana dan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (22 Juli 2016).
8. Penghargaan Attractiveness Award 2016 dari Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group sebagai Kota Terbaik dan Kategori TOP 3 Investasi Potensial. (26 Juli 2016).
9. Anugerah Jawa Public Relations (PR) Indonesia Media Relations Awards and Summit (JAPRIMAS) 2016, untuk kategori pemerintah kota. (6 Oktober 2016).
10. Penghargaan National Procurement Award 2016, Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (03 November 2016).
11. Penghargaan Laporan Kinerja Humas dalam Anugerah Media Humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (18 November 2016).
12. Anugerah Dana Rakca tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di berikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, (7 Desember 2016).



13. Penghargaan Peringkat Pertama Badan Publik Terbaik dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (21 Desember 2016).
14. Penghargaan Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas prestasi dan kontribusi, dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.(21 Desember 2016).
15. Penghargaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2 WKSS), Juara I Tingkat Provinsi Banten, (22 Desember 2016).
16. Peringkat ke-2 UN SMP Tingkat Propinsi Banten.
17. Peringkat ke-1 UN SMA Tingkat Provinsi Banten.
18. Peringkat ke-1 UN SMK Tingkat Provinsi Banten.
19. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional (SMAN4).
20. Duta Sanitasi Tingkat Provinsi Banten (SMPN 2).
21. Juara I PL2SN Jenjang SD Tingkat Provinsi Banten.
22. Juara Umum ke-2 LKS SMK Tingkat Provinsi Banten.
23. Peringkat ke-2 Pengawas Sekolah SD Berprestasi Tingkat Provinsi.
24. Peringkat ke-3 Pengawas Dikmen Berprestasi Tingkat provinsi.
25. Juara OSN SMP Tingkat Provinsi Banten.
26. Juara OSN SMA Tingkat Provinsi Banten.
27. Juara OSN SMK Tingkat Provinsi Banten.

BAB 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sebagaimana Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Tinggi. Meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan pencapaian dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian kinerja pada tahun 2016 juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, seperti halnya dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator nilai SAKIP Kota Tangerang yang baru mencapai nilai CC, untuk mencapai nilai yang lebih tinggi memerlukan kerja sama yang intensif dan sinergis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan asistensi dan konsultansi untuk pencapaian indikator tersebut.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.



Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Sasaran pada Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tangerang.

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG 2014 - 2018

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Terwujudnya penataan pertanahan	1 Persentase luas lahan bersertifikat	%	77,15	80,01	83,00	85,99	88,97
		2 Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 Persentase penerbitan kartu keluarga	%	75,56	78,34	85,56	92,78	98,00
		4 Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%	95,68	75,09	83,39	91,69	95,00
		5 Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%	18,85	48,11	65,41	82,71	98,00
		6 Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%	77,35	69,54	79,69	89,84	98,00
3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	7 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	2,92	2,86	2,90	2,96	3,00
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin	63,50	78,76	80,45	80,45	82,63
		9 Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
4	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	10 Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	3,02	3,38	3,16	3,52	3,52
		11 Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,44	1,50	1,53
		12 Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	41,72	43,49	45,57	42,61	43,47
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	13 Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
		14 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		15 Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	CC	B
		16 Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00
6	Terwujudnya aparatur yang profesional	17 Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%	0,00	0,00	85,00	85,00	87,00
		18 Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang	18,00	16,00	6,00	6,00	6,00
7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	19 Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		20 Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%	50,00	60,00	70,00	71,00	100,00
8	Terwujudnya perencanaan serta	21 Persentase output kegiatan yang tercapai	%	74,47	89,34	91,05	92,00	93,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
				2014	2015	2016	2017	2018	
penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	22	Persentase indikator sasaran yang tercapai	%	78,48	80,72	93,26	96,70	97,80	
	23	Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	24	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	25	Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	26	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%	54,50	60,14	64,00	65,90	68,89	
	27	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	28	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
10	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	29	Persentase penyediaan aplikasi perijinan online	%	0,00	0,00	5,41	54,10	100,00
		30	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	70,00	81,72	100,00

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
11	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	31 Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit	10.079	10.281	10.553	10.600	10.700
		32 Persentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%	63,70	68,10	66,30	68,00	69,00
12	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	33 Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	6,80	6,85	6,90
		34 Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	35 Jumlah Cadangan Pangan	Ton			100,00	184,67	284,67
		36 Produksi padi	Kw	64.613,00	42.669,00	36.870,00	48.170,00	47.210,00
		37 Produksi sayuran	Kw	209.380,00	214.883,00	213.946,00	224.880,00	224.880,00
		38 Produksi Buah-buahan	Kw	48.395,35	20.668,04	62.253,00	75.195,00	78.943,00
		39 Produksi tanaman bio farmaka	kg	11.878,00	8.802,00	6.394,00	6.000,00	6.000,00
		40 Produksi Daging	Ton	49.909,00	66.071,00	26.389,00	26.916,00	27.454,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
14	Meningkatnya kepariwisataan	41 Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	478.715	500.493	530.000	535.000	540.000
		42 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,75	1,95	2,15
15	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	43 Persentase Alat Ukur yang terstandar	%			2,27	46,20	65,00
		44 Persentase pasar tradisional yang bersih	%	93,55	96,77	96,77	96,88	100,00
16	Terwujudnya industri yang maju	45 Persentase industri yang memiliki standar	%	36,35	45,72	52,72	59,72	66,72
		46 Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	34.468,97	35.700,00	37.460,57	38.931,05	40.967,26
		47 Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal	%	11,66	13,41	15,28	16,58	17,88

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
17	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	48 Indeks pendidikan	Point	69,71	69,80	70,04	70,25	70,45
		49 Harapan lama sekolah	Tahun	12,86	12,90	12,94	12,99	13,03
		50 Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,20	10,20	10,23	10,25	10,28
		51 Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)	98,50	98,51	98,74	98,77	98,80
18	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	52 Indeks kesehatan	Point	78,60	78,85	78,98	79,04	79,11
		53 Angka harapan hidup	Tahun	71,09	71,29	71,33	71,38	71,42
		54 Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	20	19	5	4
		55 Jumlah Kematian Bayi	Orang	132	120	87	78	64
		56 Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%	45,62	54,87	65,02	70,00	75,02
		57 Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,12	0,16	0,10	0,09	0,08
19	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	58 Indeks pembangunan gender	Point	93,90	94,03	94,15	94,27	94,39
		59 Indeks pemberdayaan gender	Point	71,40	71,90	72,40	72,90	73,40
		60 Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang	64	73	76	74	72
20	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	61 Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	73,02	77,91	74,42	76,52	77,64
		62 Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
21	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	63 Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,70	3,11	2,97
		64 Persentase jumlah penduduk miskin	%	4,91	5,04	5,04	4,64	4,55
		65 Persentase Penanganan PMKS	%	16,67	40,00	60,00	80,00	100,00
22	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	66 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,84	7,70	7,52
		67 Jumlah lowongan kerja	Orang	13.290	14.312	15.902	16.312	17.312
23	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	68 Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%	56,25	66,67	81,25	93,75	100,00
		69 Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan	8	12	16	17	18
24	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	70 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%	0,00	36,36	66,67	100,00	100,00
		71 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan	%	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00
		72 Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang	281	93	109	85	367
25	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	73 Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		74 Persentase penyelesaian penegakan perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
26	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	75 Persentase kelompok masyarakat aktif	%	26,96	42,02	62,52	81,26	100,00
27	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	76 Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	9.047	11.488	28.744	31.619	33.780

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
28	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	77 Luas genangan dan banjir	Ha	245,00	240,00	235,00	230,00	225,00
29	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	78 Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%	99,79	99,79	99,87	99,93	99,96
		79 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	92,21	95,64	96,26	99,49	100,00
30	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	80 Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	93,00	100,00
		81 Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor			1	1	2

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016*	2017	2018
31	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	82 Persentase penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		83 Jumlah penanganan korban bencana	orang	8.058	6.715	5.839	4.963	3.971
32	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	84 Backlog rumah	%	5,25	5,18	4,93	2,26	1,98
		85 Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,70	99,42	99,43
		86 Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	358,29	350,32	339,87	54,87	38,21
		87 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	58,09	64,60	97,90	98,01	98,13
		88 Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%	32,00	38,30	44,20	48,97	50,75
33	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	89 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W	W	W	W	SK	K
		91 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	56,87	56,88	57,02	57,04	57,10

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2014	2015	2016*	2017	2018
		92 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	18,98	19,64	20,23	20,27	20,46

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya penataan pertanahan	1 Persentase luas lahan bersertifikat	%	83,00
		2 Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun	100,00
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 Persentase penerbitan kartu keluarga	%	85,56
		4 Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%	83,39
		5 Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%	65,41
		6 Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%	79,69
3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	7 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	2,90
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin	80,45
		9 Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100,00
4	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	10 Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	3,16
		11 Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44
		12 Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	45,57

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	13 Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%	60,00
		14 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		15 Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC
		16 Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%	60,00
6	Terwujudnya aparatur yang profesional	17 Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%	85,00
		18 Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang	6
7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	19 Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%	100,00
		20 Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%	31,10
8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	21 Persentase output kegiatan yang tercapai	%	91,05
		22 Persentase indikator sasaran yang tercapai	%	93,26
		23 Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	100,00
		24 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00
		25 Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%	100,00
		26 Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%	64,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		27 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	100,00
9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	28 Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%	60,00
10	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	29 Persentase penyediaan aplikasi perijinan online	%	5,41
		30 Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
11	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	31 Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit	10.553
		32 Persentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%	66,30
12	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	33 Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80
		34 Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
13	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	35 Jumlah Cadangan Pangan	Ton	100,00
		36 Produksi padi	Kw	36.870,00
		37 Produksi sayuran	Kw	213.946,00
		38 Produksi Buah-buahan	Kw	62.253,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		39 Produksi tanaman bio farmaka	kg	6.394,00
		40 Produksi Daging	Ton	26.389,00
14	Meningkatnya kepariwisataan	41 Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.000
		42 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75
15	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	43 Persentase Alat Ukur yang terstandar	%	2,27
		44 Persentase pasar tradisional yang bersih	%	96,77
16	Terwujudnya industri yang maju	45 Persentase industri yang memiliki standar	%	52,72
		46 Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	37.460,57
		47 Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal	%	15,28

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
17	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	48 Indeks pendidikan	Point	70,04
		49 Harapan lama sekolah	Tahun	12,94
		50 Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,23

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		51 Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)	98,74
18	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	52 Indeks kesehatan	Point	78,98
		53 Angka harapan hidup	Tahun	71,33
		54 Jumlah Kematian Ibu	Orang	19
		55 Jumlah Kematian Bayi	Orang	87
		56 Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%	65,02
		57 Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,10
19	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	58 Indeks pembangunan gender	Point	94,15
		59 Indeks pemberdayaan gender	Point	72,40
		60 Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang	76
20	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	61 Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	74,42
		62 Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%	100,00
21	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	63 Persentase penurunan PMKS	%	3,70
		64 Persentase jumlah penduduk miskin	%	5,04
		65 Persentase Penanganan PMKS	%	60,00
22	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	66 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84
		67 Jumlah lowongan kerja	Orang	15.902

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
23	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	68 Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%	81,25
		69 Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan	16
24	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	70 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%	66,67
		71 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	%	50,00
		72 Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang	109
25	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	73 Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00
		74 Persentase penyelesaian penegakan perda	%	100,00
26	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	75 Persentase kelompok masyarakat aktif	%	62,52
27	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	76 Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	28.744

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
28	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	77 Luas genangan dan banjir	Ha	235,00
29	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	78 Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%	99,87
		79 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	96,26
30	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	80 Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00
		81 Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor	1

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
31	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	82 Persentase penanggulan bencana	%	100,00
		83 Jumlah penanganan korban bencana	orang	5.839
32	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	84 Backlog rumah	%	4,93
		85 Persentase rumah layak huni	%	98,70
		86 Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	339,87

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		87 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	97,90
		88 Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%	44,20
33	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	89 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100,00
34	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W	W
		91 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	57,02
		92 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	20,23

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA TANGERANG TAHUN 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Target Akhir RPJMD 2018
1	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44	1,53
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP
3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	B
4	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00	100,00
5	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80	6,90
6	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.000	540.000
8	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75	2,15
9	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	37.460,57	40.967,26
10	Indeks pendidikan	Point	70,04	70,45
11	Indeks kesehatan	Point	78,98	79,11
12	Persentase penurunan PMKS	%	3,70	2,97
13	Persentase penduduk miskin	%	4,73	4,55
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,52
15	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00
16	Luas genangan dan Banjir	Ha	240	225
17	Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00	100,00
18	Persentase rumah layak huni	%	98,70	99,43
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	K

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.00
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	37.460,57

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	70,04
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	78,98
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	3,70
		Persentase penduduk miskin	%	4,73
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	240
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	98,70
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W

ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2016

No.	Sasaran	Anggaran	%
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	5.467.076.086,00	0,39
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	9.157.819.416,00	0,66
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	13.065.587.575,96	0,94
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1.512.277.518,00	0,11
5	Meningkatnya kepariwisataan	4.004.931.700,00	0,29
6	Terwujudnya industri yang maju	1.359.209.000,00	0,10
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	531.001.499.030,10	38,36
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	257.218.897.149,09	18,58
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	28.095.601.610,00	2,03
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	11.118.730.370,00	0,80
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	36.031.951.304,00	2,60
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	341.999.807.627,00	24,71
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	14.468.180.000,00	1,05
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	71.323.808.500,00	5,15
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	58.488.288.810,00	4,23
	Jumlah	1.384.313.665.696,15	100,00

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN KOTA TANGERANG TAHUN 2016

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,44	1,59	110,42	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.467.076.086,00	5.241.383.016,00	95,87
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.046.993.500,00	2.777.704.120,00	91,16
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	100,00	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	287.998.500,00	194.794.000,00	67,64
							Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	53.033.500,00	48.910.000,00	92,22
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.769.793.916,00	5.557.789.000,00	96,33

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Percentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	70,00	71,00	101,43	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.388.530.575,96	7.865.740.660,00	93,77
							Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	344.055.000,00	314.222.500,00	91,33
							Program kerjasama informasi dan media massa	4.333.002.000,00	4.162.221.500,00	96,06

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,80	6,86	100,88	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	859.214.518,00	750.704.436,00	87,37
		Percentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	359.501.000,00	344.158.000,00	95,73
							Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	293.562.000,00	189.977.727,00	64,71
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	530.000	536.963	101,31	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.864.197.700,00	1.851.285.600,00	99,31

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,75	1,80	102,86	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.933.195.000,00	1.923.768.500,00	99,51
							Program Pengembangan Kemitraan	207.539.000,00	206.902.060,00	99,69
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	35.700,00	35.638,73	99,83	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	180.775.000,00	169.225.000,00	93,61
							Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	513.340.000,00	495.400.000,00	96,51
							Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	327.224.000,00	314.444.000,00	96,09
							Program Penataan Struktur Industri	213.570.000,00	205.588.000,00	96,26
							Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	124.300.000,00	113.340.400,00	91,18

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	69,80	69,83	100,04	Program Pendidikan Anak Usia Dini	37.660.950.000,00	36.741.950.000,00	97,56
							Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	234.090.306.513,10	199.794.895.711,00	85,35
							Program Pendidikan Menengah	99.280.793.917,00	87.540.632.696,00	88,15
							Program Pendidikan Non Formal	979.606.000,00	970.356.000,00	99,06
							Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	158.989.842.600,00	154.714.230.700,00	97,31
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	78,85	78,91	100,08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.986.702.250,00	7.701.788.514,00	96,43
							Program Upaya Kesehatan Masyarakat	118.985.666.728,30	105.608.987.712,00	88,76
							Program Pengawasan Obat dan Makanan	69.080.000,00	69.080.000,00	100
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2.710.705.000,00	2.646.891.000,00	97,65
							Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.038.702.850,00	1.010.155.975,00	97,25
							Program Pengembangan Lingkungan Sehat	726.906.000,00	701.013.000,00	96,44

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.215.271.900,00	2.138.499.377,00	96,53
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	926.012.000,00	904.573.300,00	97,68
							Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	25.806.153.683,79	20.595.087.694,00	79,4
							Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5.139.603.220,00	715.658.452,00	13,92
							Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	66.140.000,00	66.140.000,00	100
							Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	240.670.000,00	240.670.000,00	100
							Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	149.320.000,00	135.155.000,00	90,51
							Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	258.063.500,00	243.163.500,00	94,23
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	9.453.480.000,00	8.237.197.370,00	90,27

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
							Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.995.000.000,00	1.773.199.000,00	88,88
							Program Peningkatan Pelayanan Umum	79.451.420.017,00	53.876.287.340,00	67,81
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	3,70	3,90	105,41	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.141.774.350,00	1.106.342.100,00	96,9
		Persentase penduduk miskin	%	5,04	5,04	100	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.186.082.000,00	1.039.914.500,00	87,68
							Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	182.522.000,00	170.342.000,00	93,33
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	24.442.633.260,00	22.879.747.662,00	93,61
							Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial	1.142.590.000,00	204.379.000,00	17,89
10	Terwujudnya penciptaan dan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,00	110,71	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.657.531.270,00	5.579.106.800,00	52,07

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	perluasan lapangan kerja						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.232.931.100,00	1.193.173.500,00	96,78
							Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.228.268.000,00	1.130.293.000,00	92,02
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	13.238.446.150,00	12.949.540.100,00	98,34
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.297.300.500,00	1.255.800.500,00	96,8
							Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	348.273.000,00	333.223.250,00	95,68
							Program pendidikan politik masyarakat	3.606.543.500,00	3.478.348.175,00	96,45
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.209.302.000,00	1.193.360.000,00	98,68
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	78.818.200,00	74.318.200,00	94,29
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	15.930.467.954,00	15.195.848.050,00	95,39
							Program pendidikan politik masyarakat	322.800.000,00	311.750.000,00	96,58

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	240	240	100,00	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	18.040.429.000,00	16.517.921.000,00	91,56
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	49.790.407.000,00	20.481.638.100,00	41,14
							Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	5.889.865.200,00	3.961.305.100,00	67,26
							Program pengendalian banjir	68.612.778.310,00	54.224.846.872,00	79,03
							Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	199.666.328.117,00	164.105.312.372,00	97,04
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	89,00	89,00	100,00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.378.749.100,00	1.223.075.490,00	88,71
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.313.668.400,00	2.135.044.700,00	92,28
							Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5.865.355.000,00	3.555.124.425,00	60,61
							Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.510.771.000,00	787.072.000,00	52,1
							Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.472.615.500,00	1.325.831.750,00	90,03

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
							Pengendalian dan Pengamanana Lalu Lintas	1.927.021.000,00	1.765.106.300,00	91,6

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	98,70	98,80	100,10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	21.652.116.000,00	16.018.508.000,00	73,98
							Program Pengembangan Perumahan	49.671.692.500,00	35.058.180.628,00	70,58
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	W	100,00	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.570.076.300,00	4.586.646.500,00	39,64
							Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	447.503.000,00	447.503.000,00	100
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	740.098.700,00	726.767.000,00	98,2
							Program Peningkatan Pengendalian Polusi	122.925.000,00	122.925.000,00	100
							Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	45.607.685.810,00	43.698.449.757,00	95,81

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Pedoman Reviu Atas Laporan kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tangerang, 24 Maret 2017

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG



Hj. ROOSTIWIE, SKM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195703271980032006

BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II.

PERENCANAAN

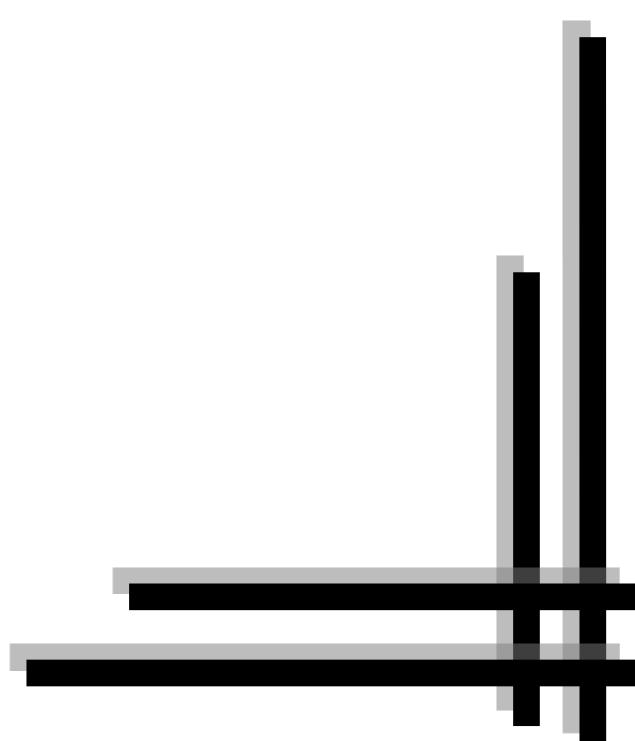
DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

BAB IV.

PENUTUP



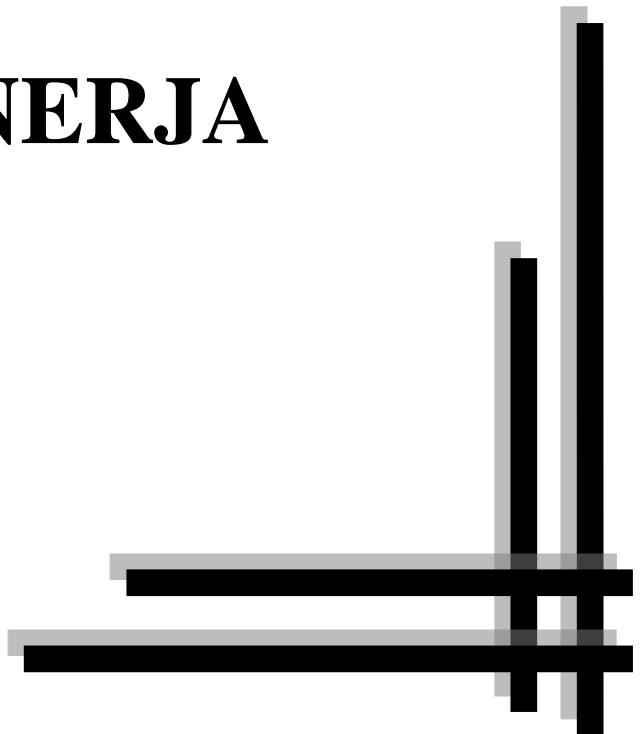
LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS

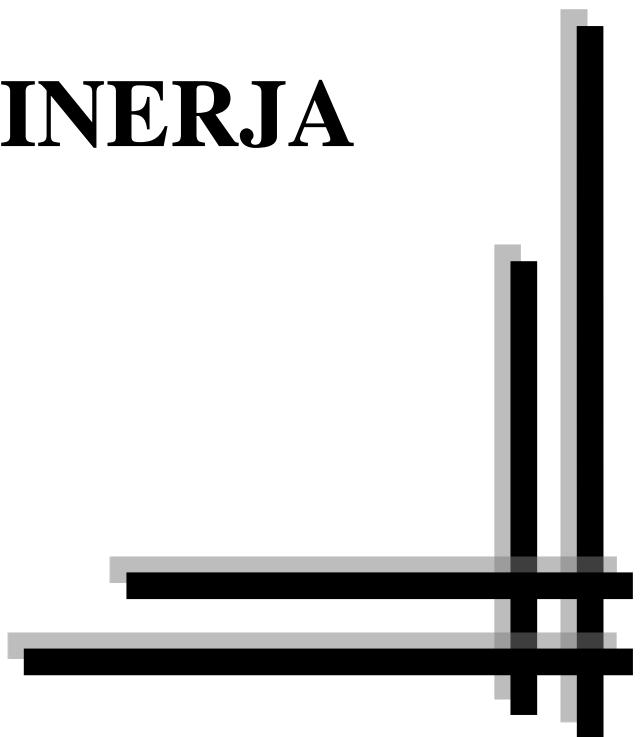
TAHUN 2014 - 2018



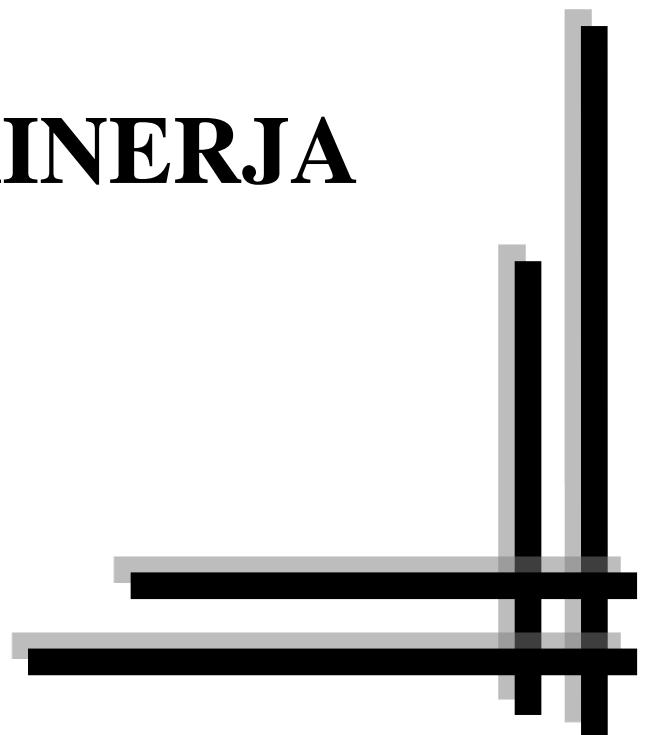
RENCANA KINERJA TAHUN 2016



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016



PENCAPAIAN KINERJA SASARAN



PERNYATAAN TELAH REVIU

